



Swantara

Majalah Triwulan Lemhannas RI No. 50 September 2024

TANTANGAN IBUKOTA NUSANTARA



Seputar Kita

Lemhannas RI Kembali Raih Opini WTP untuk Ke-9 Kalinya
Lemhannas RI Laksanakan RTD Skenario Potensi Konflik Taiwan

Profil Pejabat

Brigadir Jenderal TNI (Mar) Raja Erjan Girsang, SE., MM., MSc.: "...harus berbuat baik dan selalu mengasah rasa empati dan simpati..."

Opini

Kepedulian Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional



Versi Digital

Serba-serbi PON XXI 2024 ACEH-SUMUT

Pekan Olahraga Nasional ke-21 Tahun 2024 kali ini digelar pada 8-20 September 2024 yang akan mencetak sejarah baru karena akan diselenggarakan di 2 Provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Berikut PON XXI 2024 dalam angka:

65

Cabang Olahraga

87

Displin Cabang Olahraga

1.038

Nomor Pertandingan

11.618

Atlet

5.809

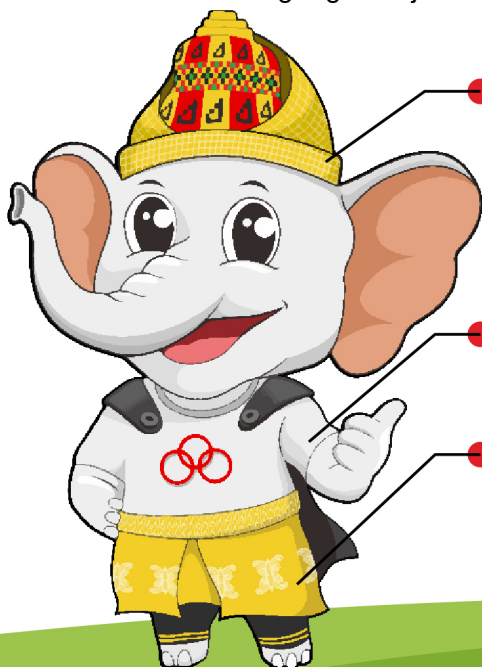
Official

Terdapat 2 maskot berbeda di PON XXI 2024 kali ini, maskot ini menjadi representasi dari daerahnya masing-masing. yuk kenalan dengan mereka!

ACEH

Po Meurah

Merupakan Gajah Putih Sumatra yang melambangkan kekuatan, kesetiaan, persatuan, dan penghargaan terhadap warisan budaya dan keagungan sejarah Aceh.



Kopiah Meukeutop atau topi tradisional Aceh yang disebut juga topi Teuku Umar, Pahlawan asal Aceh

Gajah merupakan kendaraan raja zaman dahulu

Kain tenun warna kuning asal Aceh.



SUMATERA UTARA

Matra

Merupakan Harimau Sumatera yang melambangkan kekuatan, energik dan kepemimpinan.



Tanjak Melayu merupakan penutup kepala khas melayu lambang kehormatan, amanah, tanggung jawab dan persatuan

Ulos Batak merupakan pakaian adat khas Sumatera Utara yang bermakna simbol restu, kasih sayang dan persatuan.

Gorga Batak adalah seni hias masyarakat Batak Toba mewakili simbol religius dan kemakmuran



PELINDUNG/PEMBINA EKO MARGIYONO

PENGARAH R. Z. PANCA PUTRA S.

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

DANI WARDHANA

REDAKTUR HENDRA SETIAWAN

PENYUNTING/EDITOR BAMBANG IMAN ARYANTO,

CAHYAQADRI HILDAMONA

DESAIN GRAFIS ARINI MAULIDIA

FOTOGRAFER ANGGA MITRA TAMA

SEKRETARIAT MAGISTA DIAN FITRILIA, GATOT, AIDHA

SAHLA ADIWIDYA, DWI ARIYANI, DEANNISA SAVITRI

PENULIS ARTIKEL MAULIDA ARBANINGSIH,

NAOMI AUGUSTINA, SUCITRA PUTERI RACHMAN

**ALAMAT REDAKSI BIRO HUMAS LEMHANNAS RI
JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110**

Telp. (021) 3832470

Email: redaksihumaspubbit@gmail.com

Instagram: @lemhannas_ri

Facebook: @lembagaketahanannasionalri

Twitter: @LemhannasRI

Youtube: Lemhannas RI

TikTok: @lemhannas_ri

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

**SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR
LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA SESUAI
DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI**

Salam Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Shalom

Om Swastiastu, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan

Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Majalah Swantara Edisi 50, September 2024 telah terbit di tengah-tengah kita. Tim Redaksi Majalah Swantara terus berupaya maksimal dalam menyajikan berbagai informasi pilihan dalam berbagai rubrik. Diharapkan berbagai sajian informasi dalam Majalah Swantara ini dapat memberikan sudut pandang baru yang membuka wawasan dan pengetahuan pembaca.

Untuk Laporan Utama pada edisi kali ini, disampaikan terkait pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dengan berbagai dinamikanya, IKN diharapkan menjadi simbol identitas nasional, kota berkelanjutan dunia, dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

Pada rubrik Seputar Kita, kami menyajikan informasi berbagai kegiatan yang diselenggarakan maupun diikuti oleh Lemhannas RI. Sementara rubrik profil mengangkat profil pejabat Lemhannas RI yang baru saja dilantik dan pegawai yang menjadi teladan di Lemhannas RI sehingga bisa mengenal lebih dekat dan menjadi inspirasi bagi pembaca. Selain itu, tim redaksi juga menyajikan berbagai rubrik seperti Hot News dan Ragam yang bisa menjadi pilihan referensi untuk menambah khazanah pengetahuan bagi pembaca setia Majalah Swantara.

Tim redaksi menyadari bahwa Majalah Swantara masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, redaksi mengharapkan adanya saran dan masukan dari para pembaca, demi eksistensi serta kemajuan karya jurnalistik yang disajikan pada edisi-edisi berikutnya. Tim redaksi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya Majalah Swantara Edisi 50, September 2024. Semoga, Majalah Swantara bisa memberikan banyak manfaat serta berkesan di hati para pembaca. *Grandescunt aucta labore!*

Om Shanti Shanti Shanti Om

Namó Buddhaya

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Daftar Isi



6 LAPORAN UTAMA Tantangan Ibukota Nusantara

SEPUTAR KITA



10 Direktorat Pengkajian Hankam dan Geografi Lemhannas Menyusun Strategi Pemberantasan Kejahatan Transnasional yang Terorganisir

12 Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Beri Ceramah pada Peserta PPRA 66

13 Peserta PPRA 66 Menerima Ceramah dari Panglima TNI



14 Wakil Presiden RI Harapkan Peserta PPRA 66 dan 67 Lemhannas RI Menjadi Panutan Bangsa Sesuai Nilai Pancasila

16 Lemhannas RI Memberikan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan kepada Paskibraka Tahun 2024



18 Kepala BIG: Pemanfaatan Informasi Geospasial Memerlukan Sinergi Lintas Sektor

20 Menkes RI: Masyarakat Sehat, Negara Maju

22 Lemhannas RI Kembali Raih Opini WTP untuk Ke-9 Kalinya

SEPUTAR KITA

OPINI



- 24 Lemhannas RI Selenggarakan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi PT. Pertamina Group Angkatan III dan PT. Pertamina Training & Consulting
- 26 Menko Marves: Green Leadership Kuat, Indonesia Menjadi Negara Hebat
- 28 Lemhannas RI Laksanakan RTD Skenario Potensi Konflik Taiwan

- 30 Wamen Kominfo: Transformasi Digital Mengubah Proses Bisnis dan Organisasi
- 32 Menteri Koordinator PMK RI Harapkan Peserta PPRA Menjadi Pilar Utama Indonesia Emas 2045
- 34 PPRA 66 Lemhannas RI Resmi Ditutup

- 36 Kepedulian Generasi Muda dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional
- 38 Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dan Keselarasan Terhadap Pekerja Perempuan di Lingkungan Perusahaan Jasa Konstruksi

PROFIL PEJABAT

PROFIL PEGAWAI

HOT NEWS

40

Brigadir Jenderal TNI (Mar) Raja Erjan Girsang, SE., MM., MSc.: "...harus berbuat baik dan selalu mengasah rasa empati dan simpati..."



44

Naomi Augustina: "Pekerjaan Abdi Negara adalah Pekerjaan yang Dinamis"

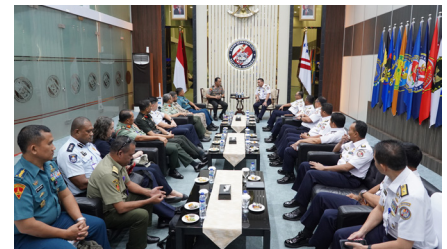


- 46 Paus Fransiskus soroti pentingnya kerukunan antar umat beragama di Indonesia
- 47 Operasi Telerobotik Pertama di Asia Tenggara

RAGAM

SUARA PESERTA

52 GALLERY



- 48 Buah Gac, Si Merah Berduri Buah dari Surga
- 49 Bermain dengan Gajah di Ekowisata Tangkahan

- 50 Kolonel Mar Kusyuwono, S.H. : "Kita Harus Bisa Memimpin Diri Sendiri"
- 51 Marsma TNI Ian Fuady Harap Lemhannas RI Terus Didik Pemimpin Bangsa yang Modern, Inovatif, dan Adaptif

52 GALLERY

TANTANGAN IBUKOTA NUSANTARA



Tanggal 17 Agustus merupakan momentum yang bersejarah bagi Republik Indonesia. di hari tersebut, 79 tahun silam, proklamasi kemerdekaan secara resmi dikumandangkan oleh Ir. Soekarno yang menandai terbebasnya Indonesia dari belenggu penjajahan.

Di tahun 2024 ini untuk pertama kalinya, Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tidak hanya dilaksanakan di Jakarta, namun juga akan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara, yang berada di dua kabupaten yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan timur.

Menteri Sekretaris Negara dalam konferensi pers Bulan Kemerdekaan pada 1 Agustus 2024 lalu menyebutkan bahwa peringatan HUT dengan tema “Nusantara Baru, Indonesia Maju” ini sekaligus momentum transisi perpindahan pemerintahan.

Rangkaian Peringatan Kemerdekaan dilakukan sejak tanggal 1 Agustus 2024 dengan konferensi pers serta zikir bersama hingga prosesi kirab duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi pada tanggal 10 Agustus 2024 di Jakarta. Acara kemudian dilanjutkan di Ibu Kota Negara (IKN) sejak tanggal 13 Agustus 2024 hingga acara puncak pada tanggal 17 Agustus 2024.

Berbagai persiapan juga telah dipersiapkan oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur jalan dan gedung untuk penginapan dipercepat, Pengamanan dilakukan bekerja sama dengan TNI dan POLRI, Dua rumah sakit milik pemerintah dan satu rumah sakit milik swasta juga beroperasi selama perayaan HUT RI di IKN hingga latihan manuver pesawat TNI AU sebagai bagian dari atraksi saat upacara.

Sejumlah 1300 tamu undangan yang terdiri dari Mantan presiden, presiden terpilih 2024-2029, pimpinan lembaga tinggi negara, menteri kabinet, tokoh masyarakat hingga pekerja di IKN menghadiri Puncak Peringatan

Kemerdekaan Republik Indonesia.

Gagasan Pemindahan Ibu Kota Negara

Gagasan Pemindahan Ibu kota Negara sejatinya sudah dua kali dicetuskan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Pada saat itu Ibu Kota Palangkaraya dipilih Soekarno sebagai Ibu Kota Negara karena bersamaan dengan penetapan Palangkaraya sebagai “sister city” Jakarta.

Gagasan tersebut kembali digaungkan Soekarno pada tahun 1965 di Bandung. Namun, gagasan tersebut belum sempat terlaksana.

Ide pemindahan kembali digagas saat masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Soeharto berencana memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Jonggol, sebuah kabupaten di Bogor, Jawa Barat. Ide tersebut juga dituangkan dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Rencana tersebut pada akhirnya tidak terealisasi karena adanya pergolakan besar di tahun 1998 silam.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat mengemukakan rencana pemindahan Ibu Kota pada Oktober 2010. Berbeda dengan gagasan Presiden sebelumnya, SBY mengusulkan salah satu pilihan untuk pemindahan pusat pemerintahan ke daerah lain dengan Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara seperti Malaysia yang memisahkan Pusat Pemerintahan di Putrajaya.

Pemindahan Ibu Kota Negara pada akhirnya digarap secara bertahap oleh Presiden Joko Widodo. Tanggal 26 April 2019, Presiden Joko Widodo melalui konferensi pers mengumumkan secara resmi pemindahan Ibu Kota Negara.

Menurut Presiden Joko Widodo, Pemindahan Ibu Kota harus dilakukan karena ekonomi Indonesia dinilai berpusat di Jawa dengan 54 persen total penduduk Indonesia juga bermukim di Pulau Jawa. Selain itu, beban DKI Jakarta sudah terlalu berat sebagai

pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.

Faktor lain yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota menurut Joko Widodo adalah Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara, hingga air yang harus diperbaiki. Hal tersebut disebabkan karena beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta. Bahkan, kesenjangan ekonomi antara Jawa dan Luar Jawa terus meningkat sejak 2001.

Dalam Konferensi Pers itu, Ibu Kota Negara diputuskan berpindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan hasil kajian mendalam yang dilakukan secara intensif selama kurang lebih tiga tahun.

Kalimantan Timur dinilai tepat menjadi Ibu Kota Negara yang baru karena lima faktor yaitu rendahnya risiko bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung api, dan tanah longsor. Kedua, Lokasi Kalimantan Timur strategis karena berada tepat di tengah Indonesia. Ketiga, Ibu Kota Negara yang baru dekat dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, wilayah tersebut memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Faktor terakhir, tersedianya lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar.

Sedangkan Jakarta, nantinya akan tetap menjadi pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa berskala regional dan global. Jakarta juga akan terus menjadi prioritas pembangunan.

Rencana tersebut kemudian dituangkan oleh Pemerintah dalam bentuk Rancangan Undang-Undang yang kemudian disampaikan kepada DPR RI.

Pada tanggal 17 Januari 2022 lalu dalam rapat bersama Panja RUU IKN, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa Ibu Kota Negara



Foto. Kementerian Sekretariat Negara

diberi nama “Nusantara” oleh Presiden Joko Widodo. Nusantara dipilih karena merupakan nama yang ikonik secara internasional dan menggambarkan Indonesia.

Perkembangan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Februari 2022 dan menjadi dasar pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut dengan IKN mengusung tema “Kota Dunia untuk Semua” .

Dikutip dari rilis tim IKN Bappenas terdapat tiga tujuan utama IKN yaitu sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan dunia, dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan IKN juga merupakan upaya mengubah paradigma pembangunan.

Presiden Joko Widodo seperti dikutip oleh Kompas.com menyampaikan bahwa pembangunan IKN pada tanggal 17 Agustus 2024 baru mencapai 15 persen. Sejumlah infrastruktur telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam menyambut kemerdekaan RI agustus lalu diantaranya bendungan Sepaku Semoi senilai Rp 836 miliar, Intake Sepaku senilai Rp 344 miliar, Jembatan Pulau

Balang senilai Rp 1,4 triliun, Taman Kusuma Bangsa termasuk Beranda Nusantara dan Bukit Bendera senilai Rp 335 miliar, Plaza Seremoni termasuk Visitor Center, Gallery UMKM, dan Forest Trail senilai Rp 381,7 miliar, Embung MBH dan 13 embung lainnya di IKN senilai Rp 484 miliar.

Selain itu, beberapa infrastruktur juga telah difungsikan sementara saat 17 Agustus 2024 yaitu Istana Negara, Lapangan Upacara Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) I satu tower, Kantor Kemenko II satu tower, Kantor Kemenko III dua tower, Kantor Kemenko IV tiga tower, Rusun ASN 14 Tower, Jalan Tol IKN Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau, Jalan Tol IKN Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung, Jalan Tol IKN Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang, dan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur.

Aspek yang perlu diperhatikan dalam Pemandahan Ibu Kota Nusantara

Walaupun sudah berjalan sejak 2022, pembangunan Ibu Kota Nusantara bukanlah perkara mudah. Presiden Joko Widodo dalam wawancara menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia 12 Agustus 2024 lalu menegaskan bahwa berpindah ibu Kota tidak sekedar urusan administrasi melalui keputusan presiden namun juga harus memperhatikan proses pembangunan di lapangan.

“Harus dilihat, kesiapan perpindahan ini. Pindah rumah saja kan kita itu wah aduh ribetnya, ini pindah ibu kota. Jangan menggampangkan,” katanya Presiden Joko Widodo dikutip dari artikel Tempo.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi Jaya Purnama dan Chotib dalam tulisannya berjudul Analisis Kebijakan Publik Pemandahan Ibu Kota Negara, terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan dalam pemandahan Ibu Kota Nusantara.

Aspek yang pertama adalah **aspek sosiologis**. Tantangan sosial akan muncul karena pemandahan IKN yang secara otomatis diikuti dengan pemandahan manusia sehingga nantinya akan berinteraksi dengan lingkungan baru dan masyarakat asli. Masyarakat baru yang awalnya merupakan minoritas lambat laun justru mendominasi IKN. Maka diperlukan adanya mitigasi penanggulangan dengan cara penguatan masyarakat asli, integrasi masyarakat asli dan pendatang, dan meningkatkan pemahaman mengenai kelestarian lingkungan.

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan relatif aman dari masalah sosial dan konflik suku, agama, ras, antargolongan (SARA) walaupun penduduknya sebagian besar merupakan pendatang dan bersifat heterogen. Penduduk di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Jawa 30,24 persen, Bugis

20,81 persen, Banjar 12,45 persen, serta Dayak 9,94 persen, dan lain-lain. Dampak kesenjangan sosial yang muncul akibat adanya Migrasi penduduk secara massal yang sebagian besar adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu diukur.

Aspek Kedua adalah **aspek geografis**. salah satu alasan pemindahan Ibu Kota yang dikemukakan Presiden Joko Widodo karena rendahnya risiko bencana alam salah satunya banjir di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki potensi banjir yang tinggi yaitu sekitar 60,34 persen. Kalimantan Timur juga berpotensi gempa dan tsunami yang disebabkan longsor bawah laut karena terdapat tiga titik sesar yaitu Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar paternoster (Kompas.com, 2019).

Aspek ketiga adalah **aspek geopolitik**. Ibu Kota Nusantara yang dibangun di Kalimantan harus siap menghadapi ancaman dari internal maupun eksternal karena dekat dengan negara tetangga. Maka dari itu, Pemindahan IKN ini perlu memperhatikan fasilitas keamanan negara karena adanya ketidakjelasan batas negara dengan Malaysia, Filipina, dan negara lain dipandang dapat menyebabkan di masa depan. Secara wilayah IKN juga lebih terbuka sehingga harus diiringi dengan kesiapan

dari aspek pertahanan dan keamanan karena adanya ancaman dari luar. IKN harus dilengkapi dengan infrastruktur pertahanan keamanan yang memadai. Posisi ibu kota Nusantara yang berada di tengah dan terbuka rawan dari invasi dan penetrasi pasukan dari wilayah laut.

Pemerintah harus mengidentifikasi dan meredam benih-benih konflik SARA yang berpotensi muncul. Potensi konflik dapat muncul dari masuknya pendatang ke daerah calon ibu kota baru. Kedatangan orang-orang dengan berbagai latar belakang etnis dan agama tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik. Sebaliknya, migrasi kalangan dari pendatang ke IKN sejauh mungkin mampu menciptakan proses politik pembaruan di antara berbagai kalangan dalam rangka menciptakan sinergi di antara potensi yang dimiliki.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bappenas, rencana pembangunan dan pemindahan IKN merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi karena transformasi ekonomi tersebut membutuhkan tersedianya sumber daya manusia berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi strategis berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi digital, integrasi ekonomi domestik, dan terakhir pemindahan IKN, sebagaimana dipaparkan Deputi Bidang Ekonomi

Kementerian PPN/Bappenas (bappenas.go.id, 2022).

Terlebih lagi, pembangunan IKN menjadi miniatur penting dalam transformasi ekonomi dengan menempatkan pembangunan dan pemindahan IKN sebagai core program sejalan dengan menjadikan IKN sebagai superhub ekonomi untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Diperkirakan dampak pemindahan IKN tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 0,1, sampai dengan 0,2 persen, seperti yang disampaikan oleh Deputi Pengembangan Regional Bappenas (bappenas.go.id, 2019). Dampak ekonomi lainnya seperti menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan karena kenaikan pendapatan sektor padat karya dan sektor padat modal, serta kesenjangan antar wilayah termasuk mendorong investasi di provinsi IKN dan sekitarnya.

Pembangunan dan pemindahan IKN memiliki potensi aspek ekonomi yang strategis melalui transformasi ekonomi dan Indonesia sentris. Namun, potensi ekonomi yang besar harus tetap mempertimbangkan aspek sosiologis, aspek geografis, dan aspek geopolitik. Oleh karena itu, pembangunan dan pemindahan IKN harus didukung semua pihak agar dapat berjalan efektif.



Foto. rri.co.id/doc.PUPR Permukiman Kaltim

PENGAJIAN STRATEGIK

Direktorat Pengkajian Hankam dan
Geografi Lemhannas Menyusun

Strategi Pemberantasan Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir

Ilustrasi. Pixabay

Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi Lemhannas RI menyelenggarakan Round Table Discussion (RTD) yang berjudul “Strategi Pemberantasan Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir” bertempat di Ruang Kresna, pada Rabu (26/6). Acara yang dipimpin langsung oleh Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P merupakan proses akhir kajian jangka panjang yang dilaksanakan Lemhannas RI.

Dalam sambutannya, Reni Mayerni menyampaikan bahwa Indonesia tercatat dalam daftar negara yang terdampak kejahatan transnasional. Menurut Global Organized Crime Index 2023, Indonesia menempati urutan ke-20 dari 193 negara. Sedangkan di Asia Pasifik, Indonesia berada di urutan kedua setelah Myanmar.

Kejahatan seperti perdagangan narkoba internasional melibatkan jaringan yang sangat luas dan kompleks dengan menggunakan metode penyelundupan yang canggih. Selain itu, perdagangan orang dan eksploitasi anak juga meningkat. Perdagangan senjata juga harus diwaspadai karena sangat rentan untuk disalahgunakan dalam situasi konflik bersenjata, baik internasional maupun nasional.

Lebih lanjut, Reni Mayerni menyampaikan penegakan hukum di Indonesia menghadapi kendala, termasuk kelemahan dalam sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan kelembagaan. Kerja sama antar negara dalam menangani

kejahatan lintas negara seperti kejahatan terorganisir transnasional dan aktivitas militan masih terbatas, serta masih lebih berfokus pada penegakan hukum dari pada upaya pencegahan.

RTD yang dimoderatori oleh Direktur Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi Marsma TNI Rolland Dulista G. Waha menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Sandy Andaryadi, A.Md.Im., S.I.P., M.Si; Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam yang mewakili Menko Polhukam RI Brigjen. Pol. Adhi Satya Perkasa. S.I.K; Penyidik Tindak Pidana Utama Tk II Bareskrim Polri yang mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia Brigjen. Pol. Tony Harsono; Kasubdit Kejahatan Lintas Negara Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Sonny Surachman Ramli, S.H., LL.M; Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Drs. Kawiyan, M.I.Kom; dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK RI Woro Srihastuti Sulistyoningrum, S.T., MIDS.

Pada kesempatan tersebut, Sandy Andaryadi menyampaikan penanganan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Penanganan tersebut adalah tidak memberlakukan ketentuan tindakan administratif keimigrasian terhadap korban, menempatkan korban di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan, korban yang ditempatkan di

dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan deteni (orang asing penghuni rumah detensi imigrasi) pada umumnya, mengupayakan agar korban segera dikembalikan ke negara asal, dan korban yang tidak memiliki dokumen perjalanan dapat diberikan surat perjalanan laksana paspor.

Adapun upaya yang dilakukan dalam penindakan TPPO dan TPPM. Pertama adalah mengusut tuntas dan menindak tegas jaringan sindikat TPPM yang melakukan penyelundupan PMI (Pekerja Migran Indonesia) secara non prosedural ke luar negeri (Pro Justitia). Kedua adalah melakukan pertukaran informasi dan kerja sama dalam menindak sindikat TPPO dan TPPM. Lalu yang ketiga, yakni melakukan penundaan penerbitan DPRI (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia) terhadap pemohon dan Penundaan Keberangkatan di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang diduga kuat sebagai calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) Non Prosedural, TPPO dan Kawin pesanan.

Kemudian yang keempat adalah melakukan sosialisasi dan bekerja sama pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap daerah kantong-kantong calon PMI. Kelima adalah melakukan penegakan hukum secara sinergis dengan stakeholder pengawasan Imigrasi WNI. Lalu yang keenam adalah membentuk tim pengawasan keimigrasian WNI selain tim PORA untuk pengawasan orang asing.



Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Beri Ceramah Pada Peserta PPRA 66

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Andyawan Martono Putra, S.I.P.

M.Tr (Han) berkesempatan memberikan ceramah kepada Peserta Program Pendidikan Reguler (PPRA) 66 di Ruang NKRI, Lemhannas RI, pada Rabu (3/7). Pada kesempatan tersebut, Andyawan Martono menyampaikan tentang kebijakan pembinaan kekuatan TNI AU.

Andyawan Martono mengawali paparannya dengan mengulas beberapa perkembangan lingkungan strategis dalam lingkup global, nasional dan regional. Pada lingkup global, konflik yang terjadi diantaranya great power competition antara Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik bersenjata di Timur Tengah dan Eropa Timur, tantangan dari kemajuan teknologi (artificial intelligence, directed energy weapon, dan hypersonic weapons), sampai serangan siber.

Kemudian Pada lingkup regional, yang terjadi adalah strategi salami slicing oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan dan

ketegangan antara Filipina dan Tiongkok. Sedangkan pada lingkup nasional, tantangannya terjadi pada pelanggaran wilayah udara Indonesia. "Dari kejadian tersebut, TNI AU berupaya untuk mengambil pelajaran sebagai langkah antisipasi melaksanakan perencanaan yang tepat sasaran dan upaya untuk menjaga kedaulatan negara," ujar Andyawan Martono.

Perkembangan lingkungan strategis tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan termasuk dalam penyusunan postur TNI AU. Postur tersebut terbagi kedalam empat rencana strategis (renstra). Pertama adalah membangun Network Centric Warfare (NCW), autonomous system dan Space Force. Kedua adalah melakukan integrasi sistem multiplatform, satelit dan satuan ruang angkasa.

Lalu yang ketiga meningkatkan interoperabilitas antar matra, artificial intelligence dan organisasi space force. Lalu yang keempat

akan dilaksanakan sistem C615R Sistem Pertahanan Udara Nasional (Sishanudnas), space operation center dan pondasi postur berikutnya. Postur TNI AU tersebut akan diimplementasikan ke dalam kebijakan TNI AU saat ini yang berprinsip pada AMPUH, yakni adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis.

Mengakhiri paparannya, Andyawan Martono menyampaikan kepada peserta agar menjadi pemimpin yang tidak hanya tangguh dan berintegritas, tetapi juga visioner dan inovatif. "Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dapat menghadapi segala tantangan dan membawa Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik," kata Andyawan Martono. Andyawan Martono berharap materi yang disampaikan dapat menjadi bekal berharga dalam menempuh jenjang karir berikutnya.





Peserta PPRA 66 Menerima Ceramah dari **Panglima TNI**

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan ceramah tentang “Kebijakan dan Strategi Penggunaan dan Gelar Kekuatan TNI” kepada Peserta PPRA 66 Lemhannas RI bertempat di Ruang NKRI, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI pada Rabu, (4/7).

“Perkembangan lingkungan strategis menjadi (pertimbangan) kebijakan dan strategi saya dalam penggunaan dan gelar kekuatan TNI,” kata Panglima TNI. Terkait hal tersebut, Panglima TNI menjelaskan berbagai isu strategis global. Menurut Panglima TNI, Indonesia yang mengambil langkah menjadi negara Non-Blok turut berpengaruh pada cara berpikir Indonesia. Perkembangan lingkungan strategis

tentunya harus menjadi patokan dalam mengambil kebijakan.

Lebih lanjut, Panglima TNI menjelaskan hal-hal yang menjadi isu strategis nasional. Diantaranya adalah kesiapsiagaan TNI dalam menjaga Indonesia pada kondisi pascapemilu dan menjelang pilkada serta kondisi menghadapi bencana alam. Kondisi nasional tentunya menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan strategi penggunaan dan gelar kekuatan TNI.

Kemudian Panglima TNI menyampaikan terkait TNI yang PRIMA. PRIMA adalah singkatan dari Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif.

Dimaksud dengan Profesional adalah langkah memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. Kemudian Responsif merupakan upaya meningkatkan kemampuan yang responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis. Selanjutnya integratif yakni memantapkan kemampuan TNI yang integratif serta bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dan komponen bangsa lainnya. Dimaksud dengan Modern yaitu mewujudkan percepatan modernisasi alutsista sesuai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Terakhir Adaptif adalah mewujudkan TNI yang adaptif sesuai tuntutan tugas dan spektrum ancaman.

PENDIDIKAN REGULER ANGGKATAN 66 DAN 67

Wakil Presiden RI Harapkan Peserta PPRA 66 dan 67 Lemhannas RI Menjadi Panutan Bangsa Sesuai Nilai Pancasila

Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin memberikan kuliah umum kepada 199 orang peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 66 dan 67 Lemhannas RI bertempat di Aula Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, pada Rabu (10/7). Kegiatan diawali dengan pelaporan aktivitas yang dilaksanakan

peserta PPRA 66 dan 67 selama menempuh pendidikan di Lemhannas RI oleh Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono.

Dalam kuliahnya, Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah berhasil dilaksanakan dengan aman dan tertib. Tugas selanjutnya adalah

merangkul semua pihak untuk tetap bersatu membangun bangsa Indonesia dan memastikan proses transisi pemerintahan berlangsung damai dan inklusif. "Transisi yang damai dan inklusif adalah esensi dari konsolidasi demokrasi yang dapat menciptakan stabilitas politik dan mendukung keberhasilan program pemerintah," ujar Ma'ruf Amin.



Ma'ruf Amin melanjutkan, saat ini semua pihak sedang dihadapkan berbagai tantangan kompleks, mulai dari ketidakpastian geopolitik global, perubahan iklim, ancaman kesehatan yang berdampak pada ketahanan pangan dan energi, serta keamanan siber yang akan memengaruhi ketahanan nasional.

Selain hal-hal tersebut, Indonesia saat ini tengah dihadapkan tantangan pemerataan pembangunan manusia terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di daerah-daerah terpencil. Daerah di kawasan Indonesia timur terutama wilayah Papua masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesenjangan ekonomi. Saat ini pemerintah juga sudah membentuk Badan Pengarah Papua sebagai upaya percepatan pembangunan di wilayah papua. Badan



tersebut akan mengkoordinasikan program-program pembangunan sesuai dengan rencana induk percepatan Papua dengan melibatkan orang asli Papua dan difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal serta keamanan hingga memberikan manfaat yang nyata bagi org asli Papua.

Lebih lanjut, selama lima tahun terakhir pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem nasional. Pada tahun 2019 kemiskinan nasional masih berada di angka 2,7% dan menurun drastis ke angka 0,8% pada bulan Maret 2024. Tim nasional perencanaan penanggulangan kemiskinan akan terus mendorong pihak-pihak terkait untuk berkolaborasi mengentaskan kemiskinan ekstrim dengan harapan hal tersebut terus dilanjutkan pada pemerintahan yang akan datang agar angka kemiskinan ekstrim dapat mencapai target 0%. Selain kemiskinan ekstrim, pemerintah berhasil menurunkan prevalensi stunting yang pada tahun 2019 berada di angka 27,7% dan berhasil diturunkan ke angka 21,5% di tahun 2023.

Tentang aktivitas ekonomi, saat ini telah disaksikan berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia dengan membawa beragama kerusakan

lingkungan, seperti deforestasi, penurunan kualitas tanah dan polusi air. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan telah dijadikan agenda pembangunan nasional dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan ketahanan ekonomi yang kuat. Prinsip tersebut selaras dengan dengan peran manusia sebagai khalifatul fil ardh, yaitu pemimpin atau pengelola di bumi dengan tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengelola keseimbangan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.

Dalam menyikapi berbagai tantangan kedepan, Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa pesan kepada peserta PPR 66 dan 67. Pertama, peserta diharapkan dapat menjadi pemimpin yang visioner, adaptif, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik. Kedua adalah peserta diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang responsif dan proaktif pada masa transisi pemerintahan. Lalu yang ketiga, peserta diminta untuk terus konsisten mendukung keberlanjutan program pemerintah.

"Kiranya para peserta juga dapat menjadi teladan dan panutan bangsa yang mampu mendorong kepemimpinan yang beretika, beradab dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila," pungkas Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin juga turut memberikan apresiasinya kepada Lemhannas RI yang terus konsisten memberikan pelatihan kepada calon-calon pemimpin bangsa.



Lemhannas RI Memberikan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan kepada Paskibraka Tahun 2024

Lemhannas RI memberikan Pembekalan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa kepada Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 15 Juli 2024 sampai Minggu, 21 Juli 2024 bertempat di Taman Wiladatika Cibubur, Jawa Barat.

“Merupakan suatu kewajiban bagi Lemhannas RI untuk berbagi dan memberikan pencerahan kepada adik-adik sekalian, terkait pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono saat menyampaikan sambutannya dihadapan 78 orang Calon Paskibraka.

Lebih lanjut, Plt. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka mengamankan BPIP untuk menyiapkan Paskibraka. Penyiapan tersebut juga termasuk membekali

nilai-nilai kebangsaan, sehingga para Paskibraka yang kelak menjadi kader calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila memiliki komitmen kuat untuk menjadi contoh bagi generasi muda Indonesia. “Sebagai kader calon pemimpin bangsa yang nantinya akan menjadi Duta Pancasila, komitmen tersebut perlu didukung oleh pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang utuh,” ujar Plt. Gubernur Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Gubernur Lemhannas RI juga mengingatkan kepada seluruh Calon Paskibraka bahwa partisipasi dalam kegiatan yang akan diikuti merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen dan tanggung jawab moral untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa. Oleh karena itu, diharapkan Calon Paskibraka dapat memanfaatkan seluruh rangkaian kegiatan dan nantinya mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Selaras dengan Plt. Gubernur Lemhannas RI, Wakil Kepala BPIP Dr. Rima Agristina, SH., SE., MM. menyampaikan bahwa Calon Paskibraka

yang merupakan kader pemimpin bangsa perlu sejak dini memiliki pemahaman yang kokoh mengenai nilai-nilai kebangsaan. Apalagi mengingat banyaknya tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Menjadi harapan besar bagi kita semua bahwa adik-adik setelah memperoleh pembekalan pembinaan ideologi Pancasila dan pembekalan nilai-nilai kebangsaan akan menjadi garda terdepan dari generasi muda dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan di masa depan,” ujar Wakil Kepala BPIP.

Menurut Wakil Kepala BPIP, ketika Calon Paskibraka telah memperoleh pengetahuan yang lengkap, langkah tegap dalam Pengibaran Bendera Merah Putih merupakan langkah tegap yang disertai tanggung jawab dan disertai kecintaan kepada Indonesia. “Apa yang dilakukan bukan sekedar pasukan pengibar bendera, tapi sungguh-sungguh mewakili seluruh bangsa Indonesia menjaga Indonesia abadi,” ungkap Wakil Kepala BPIP.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Kepala BPIP menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Lemhannas RI yang telah berkolaborasi dalam mendukung terlaksananya pembinaan nilai-nilai kebangsaan. “BPIP tidak dapat sendirian melaksanakan pembinaan ini, Lemhannas RI adalah lembaga yang paling tepat untuk bisa menguatkan nilai-nilai kebangsaan,” pungkas Wakil Kepala BPIP.





Menyikapi Konflik Israel-Palestina yang Entah Kapan Akan Berakhir?

Disampaikan kepada seluruh pembaca majalah Swantara Edisi 49/Juni 2024, bahwa terdapat kekeliruan penulisan jabatan penulis opini oleh redaksi di halaman 34 rubrik Opini dengan judul "Menyikapi Konflik Israel-Palestina yang Entah Kapan akan Berakhir?" oleh Mayjen TNI (Purn.) Endang Hairudin, S.T., M.M.

Semula tertulis:

Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Geografi Lemhannas RI

Seharusnya tertulis:

Tenaga Profesional Bidang Geopolitik dan Wawasan Nusantara Lemhannas RI

Atas kekeliruan tersebut, redaksi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan dengan dimuatnya ralat ini, maka kesalahan tersebut telah diperbaiki.

Demikian Terima Kasih.

Redaksi Majalah Swantara

PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN 67

Kepala BIG: Pemanfaatan Informasi Geospasial Memerlukan Sinergi Lintas Sektor



“Membuat peta, untuk IKN, datanya paling ideal dari foto udara karena skala yang detail,” kata Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof. Dr. rer.nat. Muh Aris Marfai, S.Si., M.Sc. Hal tersebut disampaikan Kepala BIG saat memberikan ceramah kepada peserta PPRA 67 bertempat di Ruang Bhinneka Tunggal Ika pada Kamis, 18 Juli 2024.

Menyampaikan ceramah tentang “Kebijakan Satu Peta dalam Mendukung Pembangunan IKN yang Berkelanjutan”, Kepala BIG menjelaskan tentang penyelenggaraan informasi geospasial, pelaksanaan dan pemanfaatan kebijakan satu peta, serta informasi geospasial untuk pembangunan IKN.

Informasi geospasial untuk pembangunan

IKN menghasilkan data-data yang yang dapat menganalisis berbagai hal dan potensi masalah sehingga program-program untuk mengatasinya dapat dirumuskan. Beberapa masalah yang ditemukan misalnya terdapat tumpang tindih HGU dan izin tambang dalam kawasan hutan. Dalam mengatasinya dapat dilakukan sinergi lintas sektor.

Seperti diketahui terdapat beberapa isu strategis pada pembangunan IKN, diantaranya adalah lokasi yang strategis, ketersediaan lahan dukungan pemerintah pada proses penyediaan lahan, episentrum baru sebagai simpul ekonomi baru untuk pemerataan pembangunan, dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Namun, isu strategis tersebut

juga dibarengi dengan tantangan seperti degradasi lingkungan, isu sosial misalnya ketahanan pangan, isu lingkungan misalnya adanya pemulihan pasca tambang, dan isu keberlanjutan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergi lintas sektor dalam pemanfaatan informasi geospasial. Beberapa sinergi yang telah dilakukan adalah analisis dan penentuan rencana oleh Kementerian ATR/BPN; lalu Otorita IKN melibatkan BIG dalam proses analisis deliniasi Bagian Wilayah Perkotaan IKN; kemudian BIG menyusun petunjuk teknis satuan kemampuan lahan dalam hal mendukung proses penentuan peta rencana pola ruang. Maka dapat dikatakan dalam pemanfaatan informasi geospasial dibutuhkan sinergi lintas sektor.

CAPAIAN 10 TAHUN

PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

2014 - 2024



Infrastruktur dan Pembangunan

- 366.000 km jalan desa
- 1,9 juta meter jembatan desa
- 2700 km jalan tol baru
- 6000 km jalan nasional
- 50 pelabuhan dan bandara baru
- 43 bendungan
- 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru
- Menurunkan biaya logistik dari 24% menjadi 14% di tahun 2023



Ketangguhan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia

- Pertumbuhan ekonomi terjaga >5%
- Inflasi terkendali di angka 2-3%
- Angka kemiskinan ekstrem 0,8% di 2024
- Angka stunting 21,5% di 2023
- Tingkat pengangguran 4,8% di 2024



Perlindungan Sosial

- Rp 361 Triliun anggaran Kartu Indonesia sehat dengan >92 juta penerima manfaat/tahun
- Rp 113 Triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar dengan >20 juta penerima manfaat/tahun
- Rp 225 Triliun anggaran Program Keluarga Harapan dengan kurang lebih 10 juta keluarga penerima manfaat/tahun
- Rp 60,3 Triliun anggaran Kartu Prakerja dengan kurang lebih 18,8 juta penerima manfaat/tahun



Pengelolaan Sumber Daya Alam

- Hilirisasi Nikel, Bauksit dan Tembaga
- >200 ribu kontribusi lapangan pekerjaan
- Rp158 T kontribusi pendapatan negara dalam 8 tahun terakhir
- Nasionalisasi Freeport, Blok Rokan dan Newmont



Teknologi & Digitalisasi

- Cakupan Elektrifikasi 99% pada 2024
- Penetrasi pengguna internet mencapai 79% pada 2024



PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Menteri Kesehatan RI:
**Masyarakat Sehat,
Negara Maju**

Foto. Pixabay



“*Kita punya sumber daya seperti apapun, kita punya infrastruktur seperti apapun, kalau masyarakatnya sakit-sakitan, **tidak bisa menjadi negara maju.***”

Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat memberikan Pementasan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB); Smandel Business Network (SBN); Indonesia Financial Group (IFG); dan BPJS Ketenagakerjaan pada Selasa, 24 Juli 2024.

Menyampaikan ceramah tentang Transformasi Kesehatan, Menkes RI menjelaskan bahwa transformasi kesehatan adalah salah satu langkah yang perlu dilakukan guna mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.

Dalam melakukan transformasi kesehatan, maka strategi kesehatan harus berubah. Harus dilakukan perubahan dari mengobati orang sakit menjadi menjaga orang tetap sehat. Maka yang diurus bukan pada level rumah sakit saja, tapi dimulai dari Puskesmas. Kemudian yang diurus bukan hanya dokter, tapi kader dan bidan juga perlu dimaksimalkan. Selanjutnya yang diurus bukan hanya alat operasi dan obat-obatan, tapi menggalakkan imunisasi dan skrining. “Yang diurus bukan hanya kuratif, tapi preventif,” pungkas Menkes RI.

Lebih lanjut Menkes RI mengatakan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, harus menjaga masyarakatnya tetap sehat dan produktif. Karena jika masyarakatnya tidak sehat, maka sulit untuk menjadi masyarakat yang produktif. “Kalau kita ingin negara maju, kita harus jadikan anak-anak dan keluarga kita sehat,” ucap Menkes RI. Menurut Menkes RI, tugas generasi muda dalam membawa Indonesia melompat lebih jauh akan lebih berat lagi dimasa depan. Oleh karena itu, sistem kesehatan Indonesia harus bertransformasi.

Transformasi kesehatan yang dilakukan mencakup dalam beberapa bidang, diantaranya adalah transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Diharapkan berbagai langkah yang dilakukan akan mewujudkan transformasi kesehatan guna mendukung Indonesia menjadi negara maju.

Lemhannas RI Kembali Raih

Opini WTP

untuk Ke-9 Kalinya

Plt. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI Eko Margiyono menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2023 bertempat di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Jakarta pada Kamis (25/7). Pada kesempatan tersebut, Eko Margiyono menerima langsung LHP atas LKKL Tahun 2023 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan oleh Anggota I BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana,

S.E., M.E., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE., CFA., CIISA., CFA., ChFA. Lemhannas RI berhasil meraih Opini WTP ke-9 berturut-turut sejak tahun 2015.

Nyoman Adhi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga yang telah menunjukkan keseriusannya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Pada kesempatan tersebut, Nyoman Adhi menyampaikan dalam penyusunan renstra harus sesuai pada hal-hal yang menjadi maklumat untuk mencapai visi Indonesia emas 2045 yang berdasarkan

pada empat pilar, yakni pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Telah diketahui bersama bahwa AKN 1 membawahi bidang politik, hukum dan keamanan (Polhukam). Dalam pelaksanaan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi melalui perwujudan keamanan dan ketertiban yang kondusif, peran Polhukam menjadi kondisi prasyarat bagi terlaksananya pembangunan nasional. Tata kelola yang



baik dapat mendukung peningkatan perekonomian, daya saing, peningkatan ekspor dan investasi serta penyerapan tenaga kerja.

Lebih lanjut, BPK berperan penting bagi pemerintah sebagai Quality Assurance dalam pencapaian Visi dan Misi pada setiap K/L. Penggunaan keuangan negara yang akuntabel dilakukan pemeriksaan oleh BPK. "Oleh karena itu, dengan terciptanya quality assurance yang baik pada hasil pemeriksaan keuangan, bapak ibu dapat mencapai good governance," ujar Nyoman Adhi.

Salah satu indikator good governance adalah opini hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. "Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah opini hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif," ungkap Nyoman Adhi.

Nyoman Adhi juga mengatakan bahwa opini WTP meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan rating serta

reputasi pemangku kepentingan. Selain itu, opini WTP mendorong peningkatan tata kelola good governance untuk mendukung pencapaian visi dan misi entitas dan merupakan representasi dari tata kelola keuangan yang baik. Ditegaskan juga oleh Nyoman Hadi bahwa BPK berkomitmen akan terus mendorong perbaikan ekosistem pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel yang berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam penyerahan LHP LKKL tahun 2023 tersebut, hadir 11 Kementerian/

Lembaga lainnya, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Keamanan Laut RI, Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Dewan Ketahanan Nasional RI.

” *Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah opini hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, untuk memperoleh WTP maka laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif.*

I Nyoman Adhi Suradnyana

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara





PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Lemhannas RI Selenggarakan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi

PT Pertamina Group Angkatan III dan PT Pertamina Training & Consulting

Kedeputian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI menyelenggarakan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi PT. Pertamina Group Angkatan III, yang merupakan kolaborasi Lemhannas RI dan PT. Pertamina Training & Consulting. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Mewujudkan Ketahanan Energi Melalui Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Bangsa”.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tujuh hari dari tanggal 29 Juli sampai 4 Agustus 2024 resmi dibuka oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si di Ruang Konstitusi, Lemhannas RI, pada Senin (29/7). Rasa terima kasih dan penghargaan disampaikan oleh Panca Putra kepada PT. Pertamina Training & Consulting yang sudah memercayakan dan berkenan menjalin kerja sama serta kolaborasi dengan Lemhannas RI untuk menyegarkan kembali nilai-nilai

kebangsaan di lingkungan Pertamina Group.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memiliki semangat dan kompetensi yang tinggi serta pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. “Pada akhirnya akan



terwujud karakter bangsa yang menjadi program prioritas nasional pada setiap insan Pertamina, khususnya untuk ikut serta mewujudkan Indonesia emas 2045,” ujar Panca Putra.

Dalam pelaksanaan kegiatan, peserta akan dibekali dengan berbagai materi, seperti wawasan nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, kepemimpinan nasional, literasi digital, pengantar nilai-nilai kebangsaan dan sejarah perjalanan bangsa, pembangunan karakter bangsa melalui revolusi mental, dan lainnya.

Lebih lanjut, Panca Putra menyampaikan kondisi dunia terus berubah dengan cepat. Perubahan cepat tersebut diakibatkan perkembangan geopolitik, baik yang dilatar belakangi oleh konflik antara negara, kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan sumber energi yang menopang kehidupan manusia. “Perkembangan lingkungan strategis tersebut tentu perlu menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya bagi Bapak/Ibu sekalian sesuai dengan perannya masing-masing sebagai bagian dari perusahaan yang bergerak di bidang human capital dan consulting pada BUMN yang bergerak di bidang energi,” tegas Panca Putra.

Panca Putra berharap, peserta Pertamina Group dan PT. Pertamina Training & Consulting dapat memanfaatkan kegiatan sebaik-baiknya dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara saksama, melakukan tukar pendapat, serta diskusi secara komprehensif terkait berbagai permasalahan bangsa.

Presiden Direktur PT. Pertamina Training & Consulting Muhammad Shabran Fauzani turut hadir dalam acara tersebut. Muhammad Shabran mengatakan tujuan pelatihan pementapan nilai-nilai kebangsaan tidak lepas dari peran strategis yang ditanam dalam memahami isu global yang selaras dengan isu nusantara. Ditegaskan juga oleh Muhammad Shabran sebagai individu dan profesional harus turut berkontribusi menjaga pertahanan bangsa melalui sikap nasional dengan menjunjung tinggi empat konsensus dasar bangsa.

Turut hadir dari Pertamina Group, Komisaris Utama PT. Pertamina Training & Consulting Amir Faisal, SVP Human Capital Management PT. Pertamina Persero Saptiadi Nugroho, Direktur Operasi dan pemasaran PT. Pertamina Training & Consulting Yudi Somantri dan Direktur Keuangan PT. Pertamina Training & Consulting Kurnia Pinayungan.



Menko Marves:
**Green Leadership
Kuat, Indonesia
Menjadi Negara
Hebat**



Foto. Pixabay



Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 66 Lemhannas RI resmi menggelar Seminar Nasional yang berjudul “Akselerasi Transformasi Green Leadership bagi Generasi Muda guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045” di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI, pada Selasa (20/8). Seminar tersebut diselenggarakan secara hybrid yang terbagi pada link zoom dan live streaming Youtube “Lemhannas RI”.

Prof. Dr. Hj. Zumrotul Mukaffa, M.Ag selaku Ketua Seminar PPRA 66 mengungkapkan kegiatan diskusi merupakan bagian dari proses pendidikan PPRA 66 yang dilatih, dididik, dibina dan dibimbing untuk dapat mengelola seminar dan mampu berkolaborasi dengan seluruh stakeholders untuk pengembangan green leadership di masa emas Indonesia tahun 2045.

Pt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono yang resmi membuka kegiatan diskusi mengatakan bahwa seminar nasional merupakan salah satu indikator dari kemampuan para peserta dalam menyerap dan memahami berbagai materi selama mengikuti pendidikan di Lemhannas RI. Menghadapi Indonesia emas 2045, Eko Margiyono menegaskan hal tersebut perlu disikapi, dikaji, dan dipersiapkan melalui perencanaan strategis guna mencapai cita-cita tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mempersiapkan kaderisasi pemimpin masa depan yang akan ditentukan oleh generasi muda yang

salah satunya melalui transformasi green leadership.

Green leadership memiliki peran penting dalam proses pembangunan berkelanjutan yang juga menjadi agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Sehingga setiap pemimpin negara di seluruh dunia dapat dengan cepat, tepat dan proaktif dalam mengatasi berbagai tantangan lingkungan, sosial dan ekonomi,” ujar Eko Margiyono.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertindak sebagai keynote speaker mengatakan bahwa green leadership merupakan suatu hal yang penting. Indonesia diharapkan mampu memenuhi net zero carbon emission sebelum tahun 2060.

Dikatakan juga oleh Luhut Binsar bahwa pembangunan diprioritaskan untuk melanjutkan proses transformasi ekonomi yang telah berjalan. Di sektor kemaritiman, Luhut Binsar juga menyampaikan bahwa kontribusi industri maritim masih rendah walau potensinya besar. “Anda sebagai orang Indonesia melihat potensi negaramu ini luar biasa, manage lah dengan luar biasa,” tegas Luhut Binsar.

Tentang digitalisasi yang ditegaskan di awal, Luhut Binsar menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi kunci untuk optimalisasi penerimaan dan peningkatan kualitas belanja negara dan kualitas layanan publik. Disamping itu, digitalisasi juga dapat mendorong peningkatan negara (kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat meski harga komoditas turun) dan mengurangi kesempatan korupsi.

Dengan leadership yang kuat, hal tersebut diyakini Luhut Binsar bisa dicapai. “Banggalah jadi bangsa Indonesia. We are on the right track, dengan leadership yang kuat bertumpu pada green (leadership), Indonesia bisa menjadi negara yang hebat di waktu-waktu yang akan datang,” pungkasnya.

Paparan dilanjutkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno yang menyatakan bahwa green leadership adalah sebuah keniscayaan menuju Indonesia emas 2045. Green leadership menurut Sandiaga Uno merupakan

konsep kepemimpinan yang fokus pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Disampaikan bahwa pemimpin yang mengadopsi prinsip-prinsip green leadership berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, baik dalam kebijakan organisasi maupun dalam praktik sehari-hari.

Mengenai pariwisata, Sandiaga Uno menyampaikan kontribusi pada emisi karbon secara global sekitar 8 persen. Jika masyarakat berwisata, terlihat 55 persen dihabiskan pada transport, baik udara, darat, laut. Sedangkan 35% mengacu kepada food loss and food waste. Hal yang paling mudah adalah mengurangi emisi karbon dari food (makanan). “Untuk transportasi harus mencari dampak perubahan iklim (dan) mengurangi dengan green leadership,” ujar Sandiaga Uno.

Lebih lanjut, Sandiaga Uno menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang telah menandatangani Glasgow Declaration mengenai net zero emission di sektor pariwisata. Di tahun 2035 sampai 2045 nanti, diharapkan Indonesia akan menjadi negara ASEAN pertama yang menyampaikan pariwisatanya tidak menyumbangkan emisi karbon, melainkan dapat membantu secara positif penyerapan karbon.

Mengakhiri paparannya, Sandiaga Uno mengajak masyarakat dan generasi muda dalam transformasi green leadership di industri pariwisata dengan cara konservasi energi yang ramah lingkungan, berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca melalui low carbon tourism, menjadi motor penggerak perubahan di destinasi wisata dan menjadi voluntourism.

Seminar nasional tersebut menghadirkan beberapa narasumber lainnya, yakni British Ambassador to Indonesia and Timor Leste Dominic Jermy CVO, OB, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono B. ENG., M.M, M.B.A., Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Dr.Vivi Yulaswati, M.Sc., dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., CSSL.

Lemhannas RI Laksanakan RTD

Skenario Potensi Konflik Taiwan

Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik Lemhannas RI mengadakan Round Table Discussion (RTD) dengan tema "Skenario Potensi Konflik Taiwan dan Mitigasi Bagi Indonesia". Acara ini berlangsung pada Rabu (7/8), di Ruang Kresna, dipimpin oleh Deputy Pengkajian Strategik, Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P.

Reni Mayerni membuka diskusi dengan menekankan relevansi topik tersebut mengingat dinamika geopolitik yang semakin kompleks di Selat Taiwan. Beliau mengulas sejarah ketegangan yang telah ada sejak pertengahan abad ke-20, termasuk persaingan terkini antara Tiongkok dan Amerika Serikat. "Situasi ini mengharuskan Indonesia untuk lebih waspada dan siap menghadapi semua kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan," ujar Reni Mayerni.

Menurut laporan "Risk Outlook 2024: Ten Critical Risk Scenarios Facing The Global Economy" oleh Economist Intelligence Unit, terdapat potensi aneksasi militer oleh Tiongkok terhadap Taiwan. Walaupun probabilitasnya rendah, dampaknya bisa sangat besar. Ditambah lagi, terpilihnya Lai Ching-Te dari Democratic Progressive Party (DPP) sebagai kandidat pro-kemerdekaan Taiwan dan pernyataan Presiden Xi

Jinping tentang reunifikasi Taiwan yang tak terhindarkan, menambah urgensi bagi Indonesia untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul.

"Karena kedekatan geografis Indonesia dengan Selat Taiwan, kita harus memperhatikan dampak dari berbagai skenario, termasuk status quo, reunifikasi damai, atau konflik bersenjata," tambah Reni Mayerni. Setiap skenario memiliki konsekuensi tersendiri bagi politik luar negeri, pertahanan-keamanan, perdagangan, serta kondisi sosial dan ekonomi nasional.

Dalam upaya antisipasi potensi risiko, Lemhannas RI telah melakukan berbagai kegiatan, termasuk Focus Group Discussion (FGD) dan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif.

RTD tersebut difasilitasi oleh Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lemhannas RI, Edy Prasetyono, S.Sos., M.I.S., Ph.D. Salah satu narasumber dalam acara tersebut adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan

Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Dr. Oktaheroe Ramsi, S.I.P., M.Sc.

Mengawali paparannya, Oktaheroe Ramsi menyampaikan perkembangan lingkungan strategis. Pada lingkungan global, dijelaskan oleh Dr. Oktaheroe bahwa geopolitik dunia masih dihadapkan pada persaingan kekuatan negara-negara besar dan perkembangan politik serta keamanan di kawasan Timur Tengah.

Pada lingkungan nasional, perkembangan yang terjadi masih adanya potensi ancaman militer, non militer, dan ancaman dalam negeri. Sedangkan pada lingkungan regional masih terjadinya instabilitas pada kawasan-kawasan tertentu.

Tentang mitigasi konflik China dan Taiwan, Oktaheroe Ramsi



Foto. id.rti.org.tw



menjabarkannya ke dalam empat hal, yakni diplomasi aktif, penguatan ekonomi, kerja sama regional, dan penguatan militer. Pada diplomasi aktif, mitigasi yang diperlukan adalah menjaga hubungan bilateral yang seimbang dengan China dan Taiwan, lalu menjadi mediator/penengah konflik keduanya, dan mendukung penyelesaian damai.

Lalu pada mitigasi penguatan militer, disampaikan bahwa modernisasi alutsista dan latihan militer bersama perlu dilakukan. Selanjutnya, kerja sama regional seperti ASEAN dan forum regional

lainnya harus dipererat serta diversifikasi ekonomi dan peningkatan investasi perlu ditingkatkan dalam rangka memperkuat ekonomi domestik.

RTD tersebut turut mengundang beberapa narasumber lainnya, yakni Perwira Staf Ahli Tk.III Bidang Polkamnas Panglima TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) Siswoto, M.Tr. Opsla, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Raden Edi Prio Pambudi, Direktur

Pertahanan dan Keamanan Deputy Bidang Polhukam Kementerian PPN/Bappenas RI Erik Armundito, S.T., M.T., Ph.D., Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri RI Dra. Farida Kurnianingrum, M.M., dan Ketua Program Studi Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia Broto Wardoyo, Ph.D.

PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGAKATAN 67

Wamen Kominfo:

Transformasi Digital Mengubah Proses Bisnis dan Organisasi

Foto. freepik.com

”*Dengan semakin terkoneksi masyarakat lewat teknologi digital, semua berubah. Perilaku berubah, cara menyerap informasi berubah, kehidupan berubah, hubungan sosial berubah.*

Kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Wamen Kominfo RI) Nezar Patria. Hal tersebut disampaikan saat memberikan ceramah kepada Peserta PPRA 67 Tahun 2024 Lemhannas RI bertempat di Ruang Bhinneka Tunggal Ika, pada Kamis (15/8).

Pada kesempatan tersebut, Nezar Patria menyampaikan tentang transformasi digital bagi ketahanan nasional. Wamen Kominfo menjelaskan bahwa dengan transformasi digital, ada proses bisnis dan organisasi yang berubah karena

ada adopsi digital. Sebagai aspek yang penting dalam konteks transformasi digital, ketahanan nasional harus bisa melakukan tiga fungsi utama, yakni daya tangkal keutuhan digital, pengarahannya potensi siber, dan penyatuan pola pikir.

Sejak 10 tahun terakhir proses transformasi digital terus digelorkan. Komitmen untuk membuat peta jalan yang mendampingi menuju Indonesia emas untuk memandu jalannya proses transformasi digital sudah disusun. Namun, proses transformasi digital tidak mudah dan menghadapi banyak tantangan. Beberapa tantangan



diantaranya adalah kesenjangan digital, ancaman siber, dan kebutuhan talenta digital. Oleh karena itu, tantangan tersebut harus diiringi dengan peningkatan keamanan siber, respon cepat dan ancaman siber, dan peningkatan kemampuan intelijen.

Lebih lanjut Nezar Patria menjelaskan tentang adopsi teknologi ketahanan digital. “Negara-negara maju seperti Inggris juga mengalami proses transformasi digital pada pemerintahan, pemerintah mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan layanan kepada publik,” ungkapnya.

Indonesia telah menyusun strategi imperative sebagai langkah mengadopsi teknologi ketahanan digital. Strategi imperatif tersebut terdiri dari penyediaan konektivitas ekosistem infrastruktur; penguasaan teknologi digital; penjagaan kedaulatan data dan perlindungan privasi; penguatan teknologi dan ekosistem keamanan siber; pembentukan masyarakat digital; penyusunan regulasi dan institusi; peningkatan investasi; dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan.

Mengakhiri ceramahnya, Nezar Patria menyampaikan bahwa dalam adopsi

teknologi ketahanan digital ada berbagai teknologi digital bagi sektor pertahanan di masa depan yang perlu dikembangkan. Teknologi digital tersebut terdiri atas Self-Flying Drone Technology, AI-Based Video Monitoring, Sensor Internet of Things untuk Keamanan, Quantum Computing untuk Enkripsi Data, serta Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR). “Semua teknologi punya konsekuensi yang tidak terduga, maka yang paling penting adalah kita semua paham yang terjadi secara global,” pungkask Wamen Kominfo RI.



PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN 67

MENTERI KOORDINATOR PMK RI HARAPKAN
**PESERTA PPRA MENJADI PILAR
UTAMA INDONESIA EMAS 2045**

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. memberikan kuliah umum kepada peserta PPRA 66 dan 67 Lemhannas RI di Auditorium Gajah Mada, pada Selasa (30/7). Muhadjir Effendy menjelaskan upaya pembangunan yang telah dilakukan pemerintah meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.

"Untuk mewujudkan Indonesia emas 2045, peningkatan kualitas sumber daya manusia memiliki peranan yang cukup penting," ujar Muhadjir Effendy. Dari segi pembangunan manusia pemerintah telah melakukan intervensi sejak dini, mulai dari prenatal dengan mengintervensi gizi pada ibu supaya anak-anak terlahir sehat sampai usia dini-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Lebih lanjut, melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah terus berupaya menyelesaikan angka kemiskinan penduduk Indonesia. Saat ini upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil di mana pada tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem sudah mencapai 0,83 persen, dan angka kemiskinan sudah mencapai 9,03 persen.

Muhadjir Effendy juga menjelaskan bahwa upaya pemerintah mencakup intervensi gizi untuk mencegah stunting sejak masa prenatal, serta intervensi pengukuran serentak bayi dan balita untuk memerangi stunting di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan menyediakan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi yang berkualitas tinggi. Ini dilakukan agar generasi muda bangsa siap untuk bekerja di dunia kerja di masa mendatang.

Kemudian, Muhadjir Effendy juga mengatakan bahwa hambatan dalam pembangunan manusia Indonesia saat ini adalah arus informasi yang cepat dan munculnya "post truth" di masyarakat. Post truth adalah ketika opini publik lebih dipengaruhi oleh keyakinan pribadi daripada fakta objektif.

Sejalan dengan hal tersebut, Muhadjir Effendy berharap semua peserta kuliah umum PPRA 66&67 Lemhannas RI yang merupakan pejabat, praktisi, dan ahli di bidangnya dapat menjadi pilar utama dalam menjaga generasi Indonesia dari post truth dan menyongsong Indonesia Maju. "Kita semua berharap cita-cita menjadi negara maju ini juga disertai dengan terwujudnya SDM yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia," pungkasnya.





PPRA 66 Lemhannas RI Resmi Ditutup

Setelah dibuka pada (30/1) dan diselenggarakan selama tujuh bulan, PPRA 66 Tahun 2024 Lemhannas RI resmi ditutup. Seluruh peserta dinyatakan lulus dan berhak menerima ijazah. Hal tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 180 Tahun 2024 tentang Hasil Akhir Pendidikan Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 66 Tahun 2024 Lemhannas RI.

Upacara penutupan diadakan di Ruang Dwi Warna Purwa pada Selasa, (27/8), dengan Plt. Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI Eko Margiyono, yang memimpin acara tersebut. "Saya menyampaikan apresiasi kepada para alumni PPRA 66 yang telah menunjukkan dedikasi, kesabaran, kesungguhan, ketekunan, kekompakan, dan komitmen selama pendidikan berlangsung," ujar Plt. Gubernur Lemhannas.

Plt. Gubernur Lemhannas RI juga menekankan bahwa para alumni PPRA 66 memiliki tugas penting untuk mengimplementasikan seluruh ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang telah diperoleh selama pendidikan. "Cara berpikir yang komprehensif, integral, holistik, integratif, dan profesional

harus menjadi pedoman bagi alumni saat kembali bertugas di tempat masing-masing," ujarnya. Beliau juga menambahkan bahwa watak, moral, dan etika kebangsaan, sifat negarawan, berwawasan nusantara, serta pandangan yang universal harus menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan saat menjalankan tugas.

Oleh karena itu, Plt. Gubernur Lemhannas RI memberikan empat pesan penting kepada para alumni PPRA 66. Pesan pertama, sebagai kader pimpinan tingkat nasional, para alumni harus menjadi contoh, panutan, dan teladan bagi masyarakat dengan pola pikir, sikap, dan tindakan yang selaras dengan konsensus dasar bangsa. Kedua, para alumni diharapkan memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap perkembangan kondisi sosial kemasyarakatan di lingkungan masing-masing.

Selanjutnya, para alumni PPRA 66 harus menjaga nama baik almamater. "Kebanggaan almamater hanya terletak pada karya alumniya bagi pembangunan bangsa dan negara," ucap Plt. Gubernur Lemhannas RI. Pesan terakhir adalah bahwa para alumni harus aktif bergerak di masyarakat dan

mengambil peran dalam masyarakat untuk menyukseskan program-program yang mendukung kemajuan negara.

Pada upacara penutupan tersebut, Plt. Gubernur Lemhannas RI juga memberikan dua penghargaan kepada dua peserta, yakni Kombes Pol Jefri Ronald Parulian Siagian, S.I.K., M.H. sebagai peraih nilai akademik terbaik dan Kolonel Inf Nugroho Imam Santoso, S.E., M.M. sebagai peraih nilai taskap terbaik.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pengukuhan Ikatan Keluarga Alumni PPRA 66 Lemhannas RI. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (DPP IKAL) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar melantik Kolonel Inf. Andre Clift Rumbayan, S.Sos., M.M. sebagai Ketua IKAL PPRA 66.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP IKAL mengingatkan bahwa IKAL adalah organisasi tempat berkumpulnya alumni Lemhannas. Oleh karena itu, prinsip IKAL sebagai katalisator keutuhan bangsa harus dipegang oleh setiap anggota IKAL. "Tugas kita bersama mengawal perjalanan bangsa," pungkas Ketua Umum DPP IKAL.

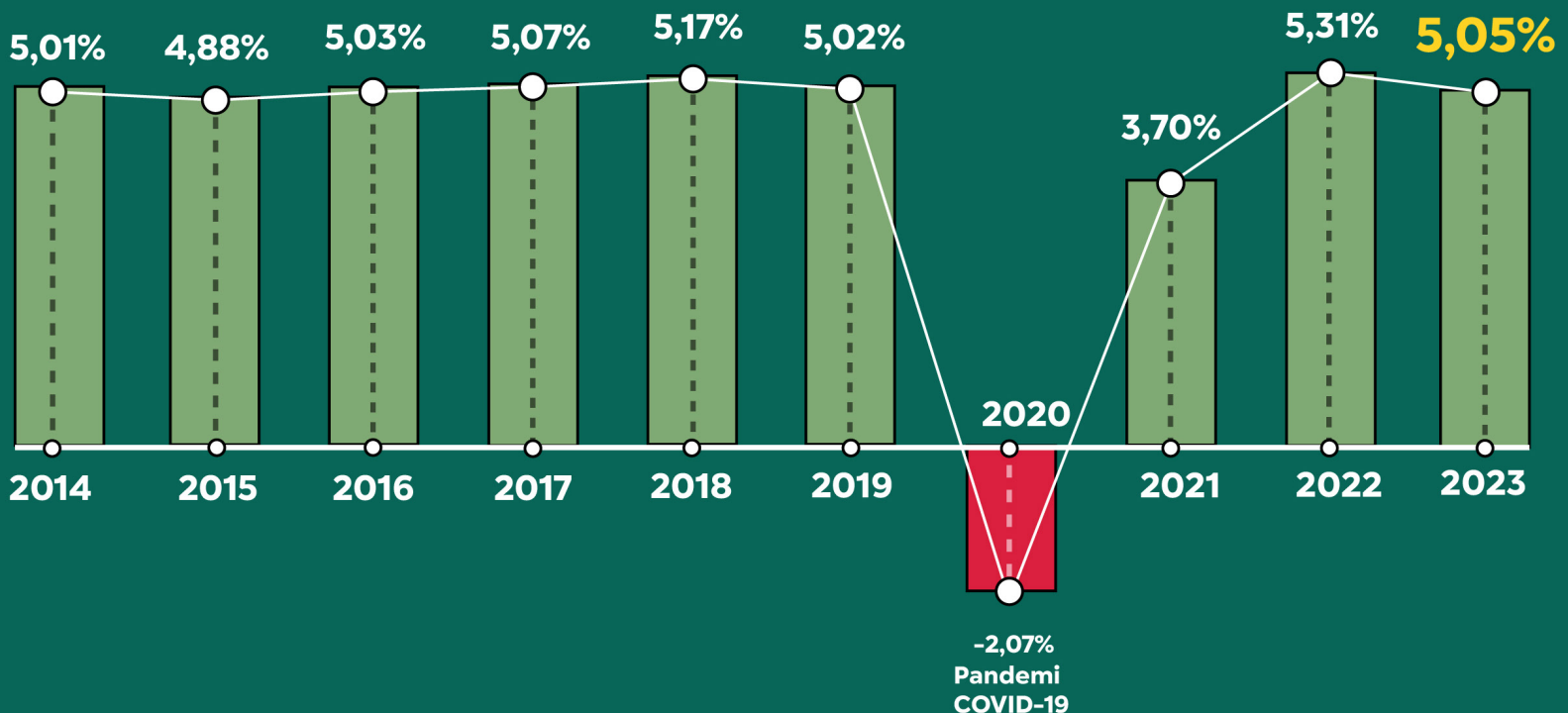
Ekonomi Indonesia Tetap Terjaga

Dalam Satu Dekade Terakhir

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 10 tahun Terakhir terjaga secara kumulatif di atas

5%

Angka Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Kepedulian Generasi Muda dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional

Mayjen TNI Benny Octaviar, MDA., CHRMP

Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Strategi Lemhannas RI



Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang mencakup keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara (Lemhannas 2015). Generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan nasional karena mereka adalah penerus dan penggerak utama pembangunan bangsa. Namun, bagaimana kondisi kepedulian generasi muda saat ini terhadap ketahanan nasional saat ini?

Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah pemuda Indonesia (usia 16-30 tahun) mencapai 64 juta jiwa atau sekitar 24% dari total populasi. Angka ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi tantangan ketahanan nasional. Namun, survei LIPI pada tahun yang sama menunjukkan bahwa hanya 40% dari generasi muda yang aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan politik, sedangkan 60% lainnya cenderung pasif atau bahkan apatis. Di era digital, generasi muda lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Data dari We Are Social dan Hootsuite (2023)

menunjukkan bahwa rata-rata pengguna internet di Indonesia menghabiskan 8 jam per hari di internet, dengan 3 jam di media sosial. Hal ini menjadi salah satu dampak pada rendahnya partisipasi langsung dalam kegiatan yang mendukung ketahanan nasional, seperti gotong royong, kegiatan kepemudaan, atau partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan.

Beberapa faktor menyebabkan rendahnya kepedulian generasi muda terhadap ketahanan nasional. Pertama, derasnya arus informasi di media sosial yang sering kali lebih menonjolkan aspek hiburan dibandingkan informasi yang mendidik dan membangun kesadaran

sosial. Kedua, kurangnya pendidikan kewarganegaraan yang memadai di sekolah-sekolah. Materi kewarganegaraan sering kali disampaikan secara teoritis dan tidak menarik, sehingga siswa tidak memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga ketahanan nasional. Ketiga, tingginya tingkat pengangguran dan masalah ekonomi di kalangan generasi muda. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di kalangan pemuda mencapai 14,34% pada tahun 2023. Kondisi ini membuat mereka lebih fokus mencari pekerjaan dan mengatasi masalah ekonomi pribadi daripada terlibat dalam kegiatan sosial atau politik. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam

meningkatkan kepedulian generasi muda adalah bagaimana mengubah pola pikir dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan yang mendukung ketahanan nasional. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya pengaruh negatif dari globalisasi dan budaya asing yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, kurangnya wadah yang dapat menampung kreativitas dan aspirasi generasi muda juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak organisasi kepemudaan yang kurang aktif atau tidak mampu menarik minat pemuda karena kurangnya dukungan dan pembinaan dari pemerintah maupun masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan komprehensif. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih praktis dan interaktif. Pemerintah perlu menyusun kurikulum yang tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga mengajarkan keterampilan praktis dalam berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua, pemerintah perlu memperbanyak program-program yang dapat meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kegiatan sosial dan politik. Misalnya, melalui program magang di instansi pemerintah, pelatihan kepemimpinan, atau kompetisi-kompetisi yang mendorong kreativitas dan inovasi. Ketiga, meningkatkan akses terhadap informasi yang edukatif dan bermanfaat melalui media sosial. Pemerintah dapat bekerja sama dengan influencer atau tokoh masyarakat untuk menyebarkan konten-konten positif yang dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam menjaga ketahanan nasional. Keempat, menyediakan lebih banyak wadah dan fasilitas untuk kegiatan kepemudaan. Pemerintah perlu membangun dan memperkuat organisasi kepemudaan, menyediakan ruang-ruang kreatif, serta memberikan dukungan finansial dan pembinaan yang memadai.

Untuk mencapai kepedulian generasi muda terhadap peningkatan ketahanan nasional, perlu ada penyesuaian dan penambahan dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Pendidikan Dasar

1. Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan Interaktif:

- Mengintegrasikan pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari siswa, seperti upacara bendera, kegiatan gotong royong, dan proyek kelompok. Mengajarkan pentingnya toleransi, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.
- Mengajak siswa untuk mengerjakan proyek-proyek yang berhubungan dengan isu-isu lokal dan nasional, seperti lingkungan hidup, budaya, dan sejarah nasional.

2. Pendidikan Kewarganegaraan yang Menarik:

- Menggunakan Media Digital, video, animasi, dan permainan edukatif untuk menyampaikan materi kewarganegaraan secara menarik.
- Mengadakan simulasi, rapat dewan sekolah, atau simulasi musyawarah untuk mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi.

Pendidikan Menengah

1. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan dan Sosial:

- Kurikulum Integratif yang mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lain seperti sejarah, geografi, dan sosiologi.
- Pelibatan Siswa dalam Kegiatan Sosial seperti kerja bakti, kunjungan ke panti asuhan, dan proyek sosial lainnya.

2. Pendidikan Berbasis Pengalaman:

- Kegiatan Ekstrakurikuler kepemudaan seperti Pramuka, OSIS, dan PMR dengan kegiatan yang mendukung pembentukan karakter dan kepemimpinan.
- Program Magang dan Relawan di instansi pemerintah, lembaga sosial, atau organisasi non-pemerintah untuk memberikan pengalaman nyata dalam berkontribusi terhadap masyarakat.

3. Pengajaran Isu-isu Nasional dan Global:

- Diskusi dan Debat tentang isu-isu nasional dan global, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan perdamaian dunia.

- Studi Kasus tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga ketahanan nasional.

Pendidikan Tinggi

1. Kurikulum Multidisipliner:

- Menambahkan mata kuliah khusus tentang ketahanan nasional yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan.
- Mendorong pendekatan multidisipliner dalam pembelajaran untuk memahami kompleksitas masalah ketahanan nasional dari berbagai perspektif.

2. Riset dan Pengabdian Masyarakat:

- Mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian yang aplikatif dan relevan dengan isu-isu ketahanan nasional, seperti ketahanan pangan, energi, dan keamanan siber.
- Memperkuat program pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dalam proyek-proyek yang meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan komunitas lokal.

3. Pendidikan Kepemimpinan dan Inovasi:

- Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan yang membekali mahasiswa dengan keterampilan memimpin, berkolaborasi, dan mengambil keputusan.
- Membentuk inkubator inovasi di kampus yang mendukung pengembangan ide-ide kreatif dan solutif untuk mengatasi tantangan ketahanan nasional.

Dengan melakukan penyesuaian dan penambahan dalam kurikulum pendidikan, diharapkan generasi muda dapat lebih peduli dan berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan nasional. Pendidikan yang interaktif, relevan, dan aplikatif akan membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi ATHG, serta menjaga integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dan Keselarasan Terhadap Pekerja Perempuan di Lingkungan Perusahaan Jasa Konstruksi

Ir. Andung Damar Sasongko, S.T., M.T., dkk*

Alumni Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi PT. Brantas Abipraya, PT. Hutama Karya, Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI), dan Pusat Kajian Pemerintahan Daerah (Puskepda) Tahun 2024

Secara naluriah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan gender berdasarkan aturan dan tanggungjawab dalam kehidupan, keluarga, lingkungan dan komunitas. Pada masyarakat tradisional, laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap aktivitas di luar rumah, sedangkan perempuan mempunyai tanggung jawab terhadap aktivitas kerumahtanggaan atau dikenal dengan pekerjaan domestik. Dalam hal ini, budaya telah mendudukan laki-laki

pada posisi superior dan perempuan pada posisi inferior semata-mata karena perempuan tidak memiliki kesempatan seperti laki-laki. Kondisi ini telah memunculkan perbedaan gender dalam masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan peradaban yang ditandai oleh meningkatnya pendidikan, maka bergeser pula peranan perempuan. Perempuan mulai keluar dari sektor domestik ke sektor publik. Dominasi laki-laki mulai berkurang sejalan dengan meningkatnya peran perempuan di sektor- sektor publik dan perempuan mulai beradaptasi dengan berbagai aktivitas publik seiring dengan peningkatan pendidikan yang dimiliki.

Beberapa tahun terakhir terdapat kecenderungan tenaga kerja perempuan merambah pekerjaan pada sektor teknik. Salah satunya pada bidang konstruksi. Hal tersebut terlihat dari

adanya peningkatan persentase jumlah perempuan yang menempuh Pendidikan pada bidang konstruksi, seperti: Teknik Sipil dan Arsitektur. Penambahan tersebut juga menunjukkan adanya penambahan jumlah perempuan yang memiliki peluang bekerja di bidang proyek konstruksi.

Keterlibatan Pekerja Perempuan pada Sektor Konstruksi

Nilai Keadilan, memiliki kemampuan untuk menegakkan dan berbuat adil bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, serta mampu pemeratakan kesejahteraan kepada semua warga bangsa, yang didalamnya terdapat nilai kekeluargaan, nilai keberpihakan kepada yg lemah, nilai pemberdayaan dan nilai produktivitas. Adapun Nilai Keselarasan yang berarti memiliki kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk memahami dan menerima budaya daerah atau kearifan lokal sebagai konsekuensi dari bangsa yang bersifat plural/majemuk (Lemhannas: 2023),



Berdasarkan data survei yang didapatkan dari para praktisi SDM di Perusahaan Konstruksi BUMN bahwa jumlah seluruh pekerja perempuan lingkungan perusahaan jasa konstruksi terutama di perusahaan BUMN Infrastruktur berjumlah sekitar 13,4% dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 86,6% dari total 100%. Hal tersebut menjadi menarik, sebab secara umum dunia konstruksi dianggap sebagai suatu profesi yang hanya ditujukan bagi kaum laki-laki, sehingga hanya sedikit saja jumlah perempuan yang menempuh pendidikan dan memilih bekerja di proyek konstruksi. Perempuan profesional pada umumnya terlibat dalam jenis pekerjaan di proyek konstruksi yang berhubungan dengan administrasi, desain, dan pendidikan; dimana jam kerjanya lebih memungkinkan untuk perempuan yang mempunyai peran ganda sebagai ibu rumah tangga untuk membagi waktunya.

Akibat dominasi kaum laki-laki pada pekerjaan konstruksi, secara informal budaya kerja yang terbentuk di dalamnya sudah menjadi budaya kerja laki-laki. Hal ini menjadi sebuah halangan tersendiri bagi perempuan untuk dapat bergabung di dalamnya karena perempuan harus menyesuaikan diri dengan cara kerja, kebutuhan dan pola karier laki-laki. Selain itu, budaya kerja organisasi dibentuk berdasarkan karakteristik dan kebijakan kaum laki-laki. Pada umumnya, perusahaan di Indonesia cenderung lebih suka merekrut laki-laki dalam proyek konstruksi, meskipun jenis pekerjaannya berhubungan dengan estimating, pemetaan, cost control dan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan ketelitian.

Keengganan employers dalam mempekerjakan kaum perempuan menjadi hambatan yang cukup besar bagi kaum perempuan untuk dapat memasuki dunia konstruksi. Disamping itu, adanya anggapan dari supervisors mengenai kemampuan perempuan dalam bekerja dan kodrat perempuan sebagai kaum lemah, pengikut suami dan feminin juga menjadi hambatan bagi pengembangan karier perempuan di dunia konstruksi dan membatasi para perempuan untuk dapat dipromosikan. Pandangan employers mengenai kemampuan perempuan sangat mempengaruhi kesuksesan karier perempuan.

Tantangan yang dihadapi Pekerja Perempuan di Sektor Konstruksi

Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya jumlah perempuan yang berkarier di proyek konstruksi diantaranya 1) Penilaian yang kurang baik mengenai pekerjaan di

proyek konstruksi, penjelasan karier yang minim serta latar belakang Pendidikan; 2) terdapat keterbatasan bagi perempuan dalam berkarier di proyek konstruksi, perempuan dibatasi untuk dapat berkembang dan memperoleh pengalaman khususnya di lapangan, serta membatasi peran, tanggung jawab serta mobilitas perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh budaya Indonesia yang cukup overprotective yang menempatkan perempuan pada posisi yang harus selalu dilindungi sesuai kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Perempuan tidak boleh untuk melakukan perjalanan bisnis dan bekerja di lapangan atau berada jauh dari tempat tinggal; 3) Persepsi mahasiswa perempuan tentang proyek konstruksi menunjukkan bahwa kondisi pekerjaan yang maskulin dan dominasi kaum laki-laki dianggap sebagai rintangan utama bagi perempuan untuk berkarier dalam proyek konstruksi.

Untuk para perempuan profesional dalam pekerjaan konstruksi, peluang pengembangan karier sangat dipengaruhi oleh komitmen kerja, status perkawinan dan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Perempuan yang sudah menikah mengaku merasakan ada perbedaan atau perubahan perlakuan dari atasan dan rekan kerjanya yang mayoritas laki-laki.

Keahlian teknis juga menjadi hal yang paling sering menjadi hambatan bagi perempuan karier, karena pada umumnya untuk dapat berkembang dalam suatu lingkungan kerja yang didominasi oleh kaum laki-laki, perempuan harus memiliki keahlian teknis yang minimum sama dengan kaum laki-laki, sehingga tidak diragukan kemampuannya dalam lingkungan kerja.

Walaupun telah memasuki era yang sudah relatif modern, tidak dipungkiri diskriminasi masih dialami oleh perempuan di berbagai bidang pekerjaan secara umum. Diskriminasi jenis kelamin dan sikap anti perempuan masih saja berlangsung di tempat kerja, bahkan beberapa penelitian di bidang konstruksi menunjukkan bahwa para perempuan menderita akibat gender dan pelecehan seksual di tempat kerja.

Perlunya Dukungan terhadap Kesempatan Karier Pekerja Perempuan di Sektor Konstruksi

Apabila merujuk pada implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila yakni pada nilai keadilan dan nilai keselarasan, maka sudah sepatutnya pekerja perempuan diberikan ruang dan kesempatan yang sama untuk bekerja di Perusahaan Jasa Konstruksi dimulai dari level terendah sampai dengan puncak pimpinan perusahaan (Dewan Direksi) sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan SK. Menteri BUMN terkait batas minimal talenta wanita untuk semua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai tindak lanjutnya, diharapkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat memprakarsai penyusunan aturan yang memberikan jaminan kesempatan karier dan perlindungan bagi perempuan di perusahaan konstruksi, terutama menyediakan posisi-posisi yang sesuai kodratnya, dan memberikan pelatihan keterampilan yang diperlukan. Hal tersebut juga memerlukan adanya kolaborasi antar berbagai Kementerian/ Lembaga/ Instansi yang terlibat dalam penyusunan materi peraturan, diantaranya Kementerian pemberdayaan perempuan dan anak terkait substansi aturan, Kementerian ketenagakerjaan terkait substansi aturan, Kementerian BUMN terkait implementasi di Perusahaan BUMN (sebagai pilot project), dan Kementerian Hukum dan HAM terkait materi perlindungan terhadap perempuan.

**Tim Penulis: Ir. Andung Damar Sasongko, S.T., M.T.; Ir. Maranatha Bernard Ferryal, S.P., M.Sc., NPDP; Bisma Jatmika Tisnasasmita, ST, MM; Dr. Hermawan, S.E., M.M., COBIT5, CIPM, Prince2F, ITIL4F, CDTP, CDBL, QIA, CRGP, CGCAE; Ir. Muhammad Ikhsan Harsono, ST; Daryanto, S.T.; Syamsul Rijal, S.T; Muhroni, S.E., M.B.A.; Angga Surya Adiputra, S.E.; Suyitno, S.STP., M.M.; Syafriyadi Miftahul Munir Lubis, Ph.D; Muhammad Haikal Akbar, ST; Ir. Syafrandy, ST, MT; Mad Roynaldi, ST; Ir. Diaz Firmansyah, ST., M.B.A.; Afrizal Adi Panuluh, ST; Habibul Muzaki, ST; Dedikasi Firansyah, S.T; Andri Rohim, S.T.; Anindita Putri Nurmalita Sari, S.E; Dianita Saraswati, S.Sos*



Brigadir Jenderal TNI (Mar)

RAJA ERJAN GIRSANG

“...harus berbuat baik dan selalu mengasah rasa empati dan simpati...”



Brigadir Jenderal TNI (Mar) Raja Erjan Girsang, SE., MM., MSc., lahir di Medan pada tanggal 9 April 1972. Erjan adalah anak ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Piara Girsang dan Susiana yang sehari-hari bekerja sebagai PNS di Pemerintah Daerah Kota Madya Medan.

Nama "Erjan" diberikan oleh seorang dokter yang merawat ibunya saat ia hendak dilahirkan. "Dulu ada dokter di Medan namanya dokter Erjan, jadi nama itu karena saya lahirnya itu pada saat dia mau pergi piknik ibu saya harus segera dirawat, 'ini mengganggu libur saya nih, kasih nama saya' katanya gitu, dikasih benar namanya," tutur pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Sekretariat Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Settama Lemhannas RI).

Bang REG (nama panggilan teman sejawat), tumbuh dalam keluarga yang besar, di mana nilai-nilai kekeluargaan dan dukungan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Rumah mereka selalu dipenuhi dengan kehangatan dan keceriaan, tempat di mana setiap anak diberi kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan minat mereka sendiri. Dari usia muda, Erjan telah menunjukkan bakat alami dalam olahraga, khususnya sepak bola. "Dulu saya pernah jadi atlet sepak bola di PSMS Medan sampai tingkat remaja dan junior ya," ungkapnya yang juga memiliki bakat dalam seni musik, yaitu bernyanyi dan bermain gitar.

Keterarikan Bang REG pada sepak bola semakin mendalam ketika ia melihat PS Angkatan Darat, sebuah tim yang dikenal dengan pemainnya yang datang ke pertandingan dalam seragam dinas. Penampilan mereka yang rapi dan serius memberikan kesan yang mendalam padanya, membangkitkan rasa hormat dan kekaguman. Ia merasa terinspirasi oleh bagaimana olahraga dan disiplin militer bisa berpadu. Ketika Erjan memasuki masa SMP dan SMA, dorongan untuk menjadi prajurit TNI semakin tumbuh. "Saya lebih memilih TNI karena saya pikir kalau di TNI kita itu harus teratur dan disiplin, dulu awalnya begitu aja sih kalau saya nggak di TNI mungkin saya saya tidak jadi teratur



dan tidak jadi disiplin," ungkap pria yang menjadi Taruna Angkatan Laut pada 1991, lulus di tahun 1994 dan menjadi Angkatan 40 / XL AAL.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Akademi Angkatan Laut, pada tahun 1995, Bang REG memulai perjalanan karirnya dalam dunia militer dengan posisi sebagai Komandan Peleton di Brigade Infanteri I, Batalyon Infanteri I, Kompi B. Sebagai Danton, Erjan bertugas mengawasi dan memimpin operasi serta latihan militer, mengasah kemampuan kepemimpinan lebih lanjut yang akan menjadi kunci suksesnya dalam berbagai posisi strategis di masa depan. Dari posisi ini, ia belajar pentingnya disiplin, strategi, dan kerjasama tim—nilai-nilai yang terus mengikuti dan membentuk setiap aspek karier militernya yang cemerlang.

Pada tahun 1999, ketika Timor-Timur melangsungkan referendurnya, Erjan Girsang yang saat itu menjabat sebagai Wakil Komandan Ki-F/Yonif-3/Brigif-I/Kormar ditempatkan sebagai salah satu anggota terakhir dari pasukan Indonesia yang bertugas di sana. Momen itu menjadi titik yang sangat berkesan dalam karir dan kehidupannya, sebuah pengalaman yang melibatkan perasaan kehilangan yang mendalam. "Saya termasuk salah satu yang terakhir, itu yang berkesan bahwa harus kita menurunkan merah putih di wilayah yang dulu kita disitu, itu satu pengalaman yang berkesan tapi sebenarnya tidak enak," tutur pria yang telah dianugerahi Satya Lencana Seroja atas dedikasinya.

Pulang ke tanah air dengan perasaan campur aduk, Bang REG membawa

pulang lebih dari sekadar memorabilia fisik; ia membawa pulang pelajaran tentang ketahanan, kehilangan, dan pentingnya menjunjung tinggi kehormatan dalam setiap tugas. Pengalaman berat itu, meskipun penuh dengan kesedihan, juga mengukuhkan dedikasi dan komitmennya terhadap negara dan prinsip-prinsip yang ia pegang teguh. Berpegang pada prinsip dan komitmennya sebagai seorang prajurit TNI pula yang mengantarkannya untuk bersekolah di National War College (setara Lemhannas RI) yang merupakan bagian dari National Defense University of the United States sebuah lembaga prestisius, dimana secara kebetulan Erjan Girsang menjadi perwira Korps Marinir yang pertama bersekolah disana. "Karena sebenarnya saya juga waktu itu tidak tahu mau ke sana. Jadi pada saat di lapangan tembak, komandan saya memberikan tantangan ke saya untuk siap berangkat ke sekolah, nggak ada apa-apa. Harus lulus setelah itu berangkat. Jadi itu seperti sesuatu yang saya tidak duga. Maunya sekolah di dalam, disuruh sekolah keluar," tuturnya

Pengalaman di NDU tidak hanya membuka wawasan Bang REG terhadap strategi-strategi militer dan diplomasi global, tetapi juga mengasah kemampuannya dalam berpikir kritis dan kepemimpinan. Setiap diskusi, setiap kelas, membawa pemahaman baru dan perspektif yang lebih luas, memperkaya pengalaman dan pengetahuannya. Selama masa studinya di National War College di Amerika, Erjan Girsang, yang juga telah berhasil menuntaskan Master Degree (M.Sc.) dalam bidang National Security, menyerap cara

pandangan yang berbeda dalam membuat keputusan strategis—pendekatan yang ia bandingkan dengan sistem di Indonesia. Di Amerika, pembelajaran berfokus pada pemahaman menyeluruh tentang aspek-aspek seperti ekonomi, informasi, diplomasi, dan militer. Setiap keputusan dibentuk berdasarkan perpaduan keempat faktor tersebut. “Jadi mereka memang karena negara maju ya. Kalau kita kan masih negara yang masih menuju maju, jadi daya tahan / ketahanan nasional itu kan masih harus perlu dijaga. Kalau mereka kan sudah stabil gitu ya. Kalau secara umum sebenarnya ya level pendidikannya sama ya,” jelas pria yang juga pernah menjadi tenaga pengajar Sub Bidang Studi Operasi Strategis di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut pada tahun 2018.

Perjalanan menuju sukses bagi Erjan Girsang bukanlah sebuah lintasan yang mudah atau cepat. Itu adalah proses berkelanjutan, yang memerlukan waktu, kesabaran, dan banyak dukungan. Baginya, dukungan itu datang tidak hanya dari dalam dirinya sendiri tetapi juga dari keluarganya, termasuk mereka yang telah berpulang. Di samping itu, istri dan dua anaknya, Mima dan Gerard, menjadi pilar utama dalam hidupnya. “Kemudian mungkin belajar dari melihat kisah-kisah sukses orang-orang yang dari biografi orang-orang yang di atas kita yang lebih sukses gitu ya baca buku-buku kan ya,” tuturnya. Dalam perjalanan karir penting untuk memiliki role model dan juga benchmarking.

Dengan memandang kehidupan sebagai perjalanan yang berkelanjutan menuju

sukses, Erjan terus berusaha menjadi contoh bagi anak-anaknya, menunjukkan bahwa setiap tantangan dapat diatasi dengan kegigihan dan dukungan dari orang-orang terkasih. Kehadiran dan kekuatan keluarganya memungkinkan dia untuk terus maju, mengejar mimpi-mimpi besar sambil tetap merawat dan membina keluarga yang ia cintai.

Dalam perjalanan hidupnya, Bang REG selalu berupaya untuk menjadi lebih dari sekadar seorang pemimpin; ia berusaha menjadi seorang manusia yang penuh dengan kebaikan, empati, dan simpati. Kesadaran ini muncul bukan hanya dari pelajaran di ruang kelas atau dari buku teks, tetapi juga dari interaksi sehari-hari dan pengalaman pribadi yang mendalam. Ia memahami betul bahwa memiliki kemampuan untuk membedakan kapan harus menunjukkan empati dan kapan harus bersimpati adalah keterampilan yang sangat penting, terutama dalam dunia yang sering kali tidak hitam putih. “Harus berbuat baik berbuat baik ya dan selalu mengasah rasa empati dan simpati jadi harus benar-benar kita mengerti kapan harus empati kapan bersimpati. Itu pemahaman yang mungkin bagi saya kadang-kadang sulit juga ya,” ungkap Erjan Girsang.

Dalam peranannya saat ini, Brigjen Girsang bertanggung jawab untuk memperkuat kerja sama dan aspek hukum di Lemhannas RI, memastikan bahwa lembaga ini beroperasi dalam kerangka hukum yang kuat serta memelihara hubungan yang produktif dengan berbagai stakeholder. Komitmen dan keahliannya dalam navigasi kompleksitas hukum dan diplomasi

telah menjadikannya figur kunci dalam memajukan agenda kerja sama strategis di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam perannya di Lemhannas, Karo Kerja Sama dan Hukum ini terus mendorong peningkatan dan pengaruh lembaga dalam kancah nasional maupun internasional. Tujuannya jelas: membangun dan memperkuat kerja sama lintas sektor, melibatkan kementerian, BUMN, serta universitas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. “Kita sudah memiliki kerjasama untuk dengan Lee Kuan Yew School of Public Policy dan King’s College London, yang sudah jalan. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa menciptakan kerja sama lain yang bisa juga meningkatkan kompetensi dari Sumber Daya Manusia di Lemhannas berupa beasiswa kuliah,” tuturnya.

Program ini merupakan langkah konkret dalam menciptakan kerja sama yang tidak hanya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Lemhannas tetapi juga memperluas jaringan dan kolaborasi dengan stakeholder terkait. Melalui inisiatif seperti ini, bertujuan untuk terus memperkuat posisi Lemhannas RI sebagai lembaga think tank kelas dunia dan kontributor utama dalam pembuatan keputusan nasional, sekaligus memastikan alumni lembaga tersebut memiliki kualitas dan keberhasilan yang tinggi dalam kepemimpinan nasional.



LAPORAN ASPIRASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK LEMHANNAS RI



SEMESTER I TAHUN 2024

Laporan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik yang telah dikelola oleh Lemhannas RI pada periode Januari - Juni 2024

Rekapitulasi


Laporan
Masuk **7**

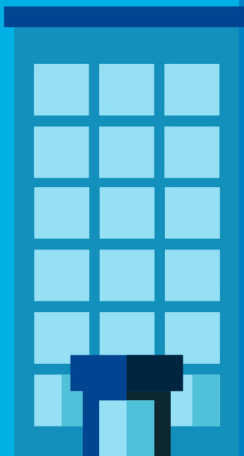

Laporan
Selesai **7**

100%
Laporan Ditindaklanjuti


2,1
Hari Rata-rata
Tindak Lanjut

Unit Kerja

Deputi Bidang
Pengkajian
Strategik **2**
Biro Umum
Settama **4**
Inspektorat **1**



Jenis Kelamin

Perempuan  **4**
Laki-laki  **3**

Kategori

 Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme **3**

 Perimbangan
Keuangan Pusat
dan Daerah **1**

 Penyalahgunaan
Wewenang **1**

 SP4N-LAPOR!
1

 Pembinaan
Kepegawaian **1**

A portrait of Naomi Augustina, a young woman with long black hair and glasses, wearing a blue button-down shirt. She is smiling and has her hands clasped in front of her. A name tag on her shirt reads "NAOMI A.T.". The background is a bright, modern office space with large windows and a wooden ceiling.

NAOMI AUGUSTINA

Jurnalis Rohumas Settama Lemhannas RI

Pekerjaan Abdi Negara Adalah Pekerjaan yang Dinamis

Naomi Augustina, yang akrab disapa Naomi, memulai perjalanan karirnya setelah lulus dari pendidikan Diploma jurusan Vokasi Komunikasi Universitas Indonesia pada tahun 2018. Dirinya kemudian memutuskan untuk mendaftar menjadi ASN. Masih membekas di benak Naomi ketika dirinya harus segera memenuhi berkas persyaratan pendaftaran. "Tidak lama setelah saya lulus, diadakan pendaftaran CPNS dan di hari terakhir pendaftaran saya mencoba mendaftarkan diri. Hal ini menjadi salah satu momen berkesan karena saya berpacu dengan waktu untuk melengkapikan semua persyaratan," tuturnya sembari tersenyum.

Beruntung, Naomi berhasil memenuhi seluruh persyaratan sebelum tenggat waktu. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran yang berharga bagi wanita kelahiran Jakarta 27 tahun silam ini. "Pengalaman tersebut menjadi salah satu pelajaran yang membentuk pribadi saya saat ini untuk menjadi pribadi yang lebih mempersiapkan diri agar tidak terburu-buru," jelasnya.

Dirinya menyebutkan bahwa selama proses seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri saat itu, ia selalu berusaha melakukan yang terbaik dan berdoa. Menurutnya, berdoa dan berusaha harus dilakukan bersamaan dan kemudian dilanjutkan dengan berserah. "Keduanya harus dilakukan secara seimbang dan beriringan

kemudian diakhiri dengan berserah. Mengutip lirik lagu "Berserah" dari GAC "Berserah bukan berarti menyerah, tapi tak henti percaya," jelasnya sembari tertawa.

Banyak masyarakat menilai pekerjaan menjadi abdi negara sebagai pekerjaan yang monoton. Namun, Naomi memaknainya dengan sudut pandang yang berbeda. "Saya memaknai pekerjaan menjadi abdi negara sebagai pekerjaan yang dinamis. Karena bekerja pada bidang kehumasan, seringkali saya dituntut menghadapi berbagai perubahan dalam kegiatan sehari-hari," ungkapna.

Selain itu, anak terakhir dari empat bersaudara ini menilai pekerjaannya sebagai pekerjaan tidak biasa. "Pekerjaan saya sebagai abdi negara merupakan pekerjaan yang unik karena mempertemukan saya dengan orang-orang dari berbagai latar belakang," imbuhnya.

Bertugas sebagai Jurnalis Humas Lemhannas RI, Naomi banyak bertemu dengan pemimpin institusi pemerintah, akademisi, praktisi, hingga kalangan swasta. Dari pengalaman tersebut dirinya menyadari bahwa untuk membangun Indonesia dibutuhkan banyak kolaborasi dari berbagai pihak.

Selain itu, ASN yang mendapatkan Predikat Pegawai Teladan Lemhannas RI Golongan II tahun 2024 ini menekankan bahwa sebagai pelayan publik, seorang

ASN seharusnya berorientasi melayani. "Sudah seharusnya sebagai abdi negara kita berusaha untuk membantu masyarakat tanpa menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Seorang abdi negara sudah seharusnya menyadari bahwa melayani rakyat merupakan sebuah kewajiban, bukan sebaliknya," jelasnya.

Sebagai ASN muda Lemhannas RI, Naomi berharap dirinya dapat memberikan warna dan dampak positif dalam menjalankan tugas sebagai ASN. "Semoga saya bisa memberikan ide-ide segar yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya juga berharap makin banyak kesempatan untuk mengembangkan diri dan banyaknya kesempatan kolaborasi dengan teman-teman humas instansi lainnya guna meningkatkan kualitas kehumasan Lemhannas RI," ujarnya.

Naomi juga berharap generasi muda yang di Lemhannas RI dapat bekerja sama agar Lemhannas RI dapat bertransformasi menyambut Indonesia emas 2025. "Saya berharap banyak teman-teman generasi muda dapat bekerja sama agar Lemhannas RI dapat bertransformasi menyongsong Indonesia Emas 2045," pungkasnya menutup wawancara.

● HOT NEWS

Paus Fransiskus melakukan kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada hari Rabu, 4 September dengan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Paus Fransiskus merupakan momen penting bagi Indonesia dan beragam umat beragamanya. Sebagai pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus sangat dihormati dan dikenal tidak hanya karena bimbingan spiritualnya, tetapi juga karena kerendahan hati dan kesederhanaannya-sifat-sifat yang sangat kontras dengan penampilan mewah di kalangan elit global.

Duduk di kursi roda, Paus yang berusia 87 tahun itu disambut oleh Presiden Jokowi dan jajaran menteri di kompleks istana. Setelah upacara singkat di depan gedung, Paus menyampaikan pidato pertamanya dalam lawatan ambisius selama 12 hari ke Asia-Pasifik yang juga akan mencakup Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura.

Hubungan antar agama adalah tema utama dari perjalanannya di Indonesia yang multiagama dan multi etnis, yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih lanjut dalam pidatonya di hadapan ratusan politisi dan pemuka agama, Paus menyampaikan bahwa kerukunan dalam keragaman hanya dapat dicapai ketika setiap kelompok etnis dan denominasi agama bertindak dalam semangat

persaudaraan sambil mengejar tujuan mulia untuk melayani kepentingan bersama.

Sebagai rumah bagi agama Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu, serta ratusan aliran kepercayaan lainnya, Indonesia dikenal sebagai negara yang toleran. Namun, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia ini telah menghadapi sejumlah aksi intoleransi dan ekstremisme agama dalam beberapa dekade terakhir, termasuk Bom Bali I pada tahun 2002 yang menewaskan 202 orang.

Kepala Negara Vatikan ini juga mengungkapkan harapannya untuk menyaksikan banyak dialog antar agama di seluruh dunia untuk menghapuskan berbagai prasangka dan menumbuhkan rasa saling percaya dan menghormati antar agama.

Jokowi menyatakan dalam sambutannya bahwa kunjungan Paus ini menunjukkan pesan perdamaian dan toleransi yang ingin disebarkan oleh Indonesia dan Vatikan, terutama di tengah ketegangan global saat ini, termasuk di Timur Tengah.

"Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung Two-State Solution karena perang tidak akan menguntungkan siapa pun. Perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil," ungkapnya.

Paus menambahkan bahwa setiap orang harus berperan serta dalam memupuk persatuan Indonesia, tetapi ia juga menekankan bahwa tanggung jawab utama ada pada para pembuat kebijakan untuk membuat perubahan di tingkat nasional. Mereka yang terlibat dalam politik harus memperjuangkan keharmonisan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, Paus Fransiskus juga menekankan isu-isu lingkungan yang mendesak dan menyerukan kebijakan lingkungan yang tegas untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Paus secara konsisten menyoroti dampak perubahan iklim yang tidak proporsional.

Kunjungan Paus Fransiskus merupakan sebuah momen refleksi dan ajakan untuk bagi masyarakat Indonesia untuk menegaskan kembali komitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mengambil langkah tegas menuju masa depan yang berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.

Paus mengakhiri kunjungannya di Indonesia dengan pertemuan antaragama di Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat dan Misa di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada hari Kamis yang dihadiri oleh lebih dari 80.000 jemaat.

Sumber: Berbagai Sumber

Paus Fransiskus

Soroti pentingnya kerukunan antar umat beragama di Indonesia



Foto: Presidenri.go.id

Foto. Dokumentasi RSCM

Operasi Telerobotik Pertama di Asia Tenggara

Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang berhasil melakukan operasi telerobotik pada manusia. Pada tanggal 30 Agustus lalu, sebuah operasi jarak jauh untuk pengobatan ginjal secara langsung antara Jakarta dan Bali berhasil dilakukan. Dokter spesialis bedah urologi Ponco Birowo melakukan prosedur pengangkatan kista pada ginjal kanan pasien dengan menggunakan pengendali robotik di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ia dibantu oleh ahli onkologi urologi Agus Rizal Ardy Hariandy Hamid.

Seorang pria berusia 71 tahun berada di ruang operasi Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Jakarta, yang jaraknya hampir 1.200 kilometer dari Bali. Dokter spesialis onkologi Chaidir A. Mochtar dan beberapa dokter bedah serta para perawat membantu proses operasi di Jakarta. Operasi ini menggunakan perangkat yang dibuat oleh Edge Medical Robotics dari Tiongkok.

Operasi ini bertujuan untuk menilai waktu latensi dan kerja umum konfigurasi jarak jauh, termasuk bandwidth internet nirkabel dan jitter jaringan, untuk kelayakan dan keamanan operasi jarak jauh dengan bantuan robot di masa depan.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas pencapaian ini. "Tolong disebarluaskan bahwa Indonesia juga maju teknologinya. Kita bisa melaksanakan telerobotic surgery yang bisa memajukan teknologi kesehatan Indonesia," ucap Menkes Budi dalam konferensi pers di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta (30/8) dikutip dari kemkes.go.id.

Budi menyebut operasi ini sebagai sebuah "terobosan". Pencapaian ini merupakan sebuah batu loncatan penting bagi Indonesia untuk menjadi pusat inovasi global dalam bidang kesehatan.

Sebelum operasi ini, dokter bedah jarak jauh di Jakarta, Singapura dan Thailand telah melakukan praktik semacam itu sebelumnya, tetapi belum ada yang dilakukan pada manusia. Operasi di Thailand pada tahun 2008, yang merupakan operasi gabungan dengan Jepang, dilakukan pada seekor babi. Sementara itu, operasi gastrektomi di Singapura pada tahun 2023, juga dengan Jepang, dilakukan pada manekin.

Ponco Birowo menyatakan bahwa keselamatan pasien merupakan prioritas utama. Para dokter berlatih dengan model

untuk melakukan sayatan dan jahitan sebelum akhirnya dipilih satu orang yang dianggap cukup terlatih sebagai dokter bedah. Staf medis juga mendapatkan persetujuan dari pasien dan keluarganya agar operasi dapat dilakukan dari jarak jauh dan disiarkan secara langsung.

Dua kunci utama dari operasi ini, yaitu konsol dokter bedah di Bali dan lengan robotik di Jakarta, dihubungkan dengan koneksi internet berkecepatan tinggi melalui kabel serat optik. Koneksi tersebut harus memiliki bandwidth lebih dari 50 megabit per detik (mbps), dengan waktu latensi di bawah 150 milidetik (ms) dan jitter jaringan tidak boleh lebih dari 10 ms.

Dengan teknologi robotik yang didukung oleh jaringan berkecepatan tinggi, dokter bedah dapat menangani pasien dari jarak jauh dengan presisi tinggi. Di masa depan, operasi robotik dan telerobotik diharapkan dapat diterapkan di lebih banyak rumah sakit dengan mengikuti perkembangan sistem robotik dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan. Operasi telerobotik ini juga diharapkan dapat membantu pemerataan layanan kesehatan di Indonesia, karena dapat mengatasi hambatan geografis dan sosio-ekonomi.

Sumber. Berbagai Sumber

Buah Gac

Si Merah Berduri Buah dari Surga

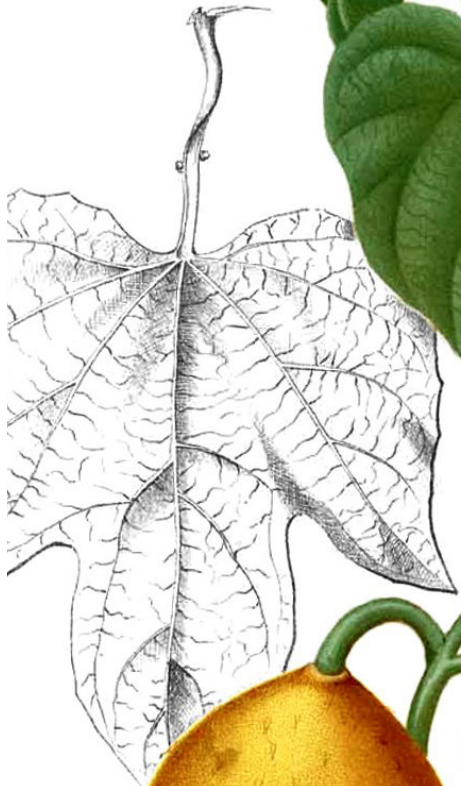


Foto. wikimedia.org.jpg

Buah yang jika matang berwarna merah ini masih terbilang langka di Indonesia. Buah Gac yang memiliki duri tumpul pada kulitnya ini banyak ditemukan di Asia Tenggara. Karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat banyak, buah Gac mulai dibudidayakan di Indonesia yaitu di Gunungkidul, Yogyakarta.

Buah Gac (*Momordica cochinchinensis*) tergolong dalam keluarga Cucurbitaceae (melon, mentimun maupun labu-labuan). Buah ini memiliki bentuk bulat dan pada permukaan kulitnya terdapat duri tumpul yang menutupi seluruh lapisan kulit tersebut.

Dilansir website The Heaven Fruit (2024), buah tropis yang terkenal dengan sebutan buah surga ini berasal dari Asia Tenggara

seperti dari Thailand, Vietnam, Laos dan Kamboja. Ukuran buah Gac sebesar melon atau semangka kecil. Saat muda kulit buah berwarna hijau dan akan berubah menjadi merah tua atau oranye saat matang. Ketika buah dibelah akan terlihat bagian dalam berwarna merah darah.

Tanaman buah Gac memiliki sulur yang panjang hingga 15 meter dan berdiameter batang berkisar 4 cm. Daunnya memiliki lebar 10 hingga 15 cm dan berwarna hijau tua dengan 3 hingga 5 lobus.

Buah Gac kaya akan kandungan fitokimia seperti karotenoid, flavonoid dan fenolik yang berperan sebagai antioksidan untuk kekebalan tubuh serta antikanker. Aril buah Gac memiliki kandungan karotenoid yang cukup tinggi seperti likopen dan beta-karoten (vitamin A) serta vitamin C. Beta-karoten tersebut 10 kali lebih banyak daripada yang terdapat pada wortel.

Sedangkan likopen pada buah Gac kandungannya 70 kali lebih banyak daripada tomat. Selain itu kandungan gula yang rendah menjadikan buah ini baik untuk diabetes. Sehingga beberapa khasiat yang diberikan buah gac menjadikan sebagai buah yang disebut dari surga.

Dilansir Echo Community (2024), tanaman ini hanya menghasilkan buah Gac setahun sekali. Buah dapat dipanen 5 bulan setelah berbunga. Tanaman buah Gac biasanya berbunga 2 hingga 3 bulan setelah penanaman bibit.

Buah Gac matang yang berwarna merah dan berduri pada permukaan kulitnya ini, disebut tidak memiliki rasa atau hambar. Diiansir dalam website edivaseries.com (2024), bagian dalam buah ini seperti buah markisa. Rasanya lebih dominan asam dan sedikit manis, namun terkadang juga hambar bahkan sedikit pahit. Sedangkan teksturnya disebut lembut seperti buah naga.

Pada lapisan bawah kulitnya terdapat lapisan daging berwarna kuning hingga oranye dengan ketebalan 1 hingga 2 cm yang disebut mesocarp. Sedangkan dibagian dalam buah terdapat 15 hingga 20 biji dengan warna cokelat hingga hitam. Dimana setiap biji ditutupi oleh selaput (aril) dengan warna merah dan berminyak. Bagian ini yang dapat dimakan dan mengandung banyak gizi.

Sumber: idntimes.com

● RAGAM

Tangkahan merupakan ekowisata yang termasuk di dalam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Ekowisata ini terletak di Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Kawasan wisata Tangkahan terkenal dengan julukan The Hidden Paradise of North Sumatera karena panoramanya yang cantik alami bagai surga yang lokasinya tersembunyi.

Terdapat berbagai pohon serta vegetasi hutan tropis tumbuh subur di lahan hijau membentang dan merupakan rumah bagi harimau sumatera, badak sumatera, orangutan sumatera, dan gajah sumatera. Selain itu, Tangkahan memiliki hutan Tangkahan yang lebat, sungai, air terjun, air panas, lembah, serta tumbuhan langka seperti Rafflesia. Kekayaan alam kawasan ini tidak hanya menjadikannya sebagai tempat wisata, melainkan juga tempat belajar mengenai alam, flora, dan fauna.

Tangkahan identik dengan gajah karena Tangkahan juga merupakan pusat konservasi gajah yang dinamai Conservation Response Unit. Sebetulnya kegiatan wisata bukanlah kegiatan utama di Ekowisata Tangkahan. Namun, untuk menunjang ekonomi masyarakat sekitar, gajah kemudian dijadikan bagian dari kegiatan wisata. Meski begitu, gajah yang dilibatkan diberi perlakuan dan diberi asupan makanan sehat seperti biasanya. Aktivitas wisata paling disukai wisatawan di Tangkahan adalah bermain bersama gajah, memberi makan gajah, menunggangi gajah, dan memandikan gajah di pagi hari.

Selain dikenal dengan konservasi gajah, Tangkahan juga lekat akan konservasi berbasis masyarakat. Bermula dengan menghadirkan empat ekor gajah yang didatangkan dari Aceh membuat masyarakat mulai memahami manfaat dari kegiatan konservasi dan pengembangan wisata. Selain menjaga kelestarian alam, Ekowisata Tangkahan juga berimbas langsung pada

peningkatan perekonomian masyarakat yang akhirnya dapat menghentikan aktivitas penebangan liar.

Selain gajah, Tangkahan memiliki banyak hal untuk dijelajahi, misalnya Jungle Trekking, River Tubing. Wisatawan akan diajak mengelilingi hutan dan sungai Tangkahan menggunakan ban. Topografi bukit dengan tebing sesuai untuk pecinta panjat tebing, mendaki gunung, maupun berkemah. Di sekitar kawasan juga terdapat air terjun dengan pemandangan segar dan sumber air hangat yang dapat digunakan untuk berendam yang terletak di sisi sungai.

Ada juga sebuah spot yang menarik wisatawan yaitu jembatan gantung di kawasan Tangkahan yang memiliki pemandangan eksotis. Adrenalin akan terpacu saat melewati jembatan yang menggunakan tali besi yang hanya berjarak sekitar satu meter lebih dari tali satu ke tali besi lainnya untuk menahan berat papan dan pengunjung.

Sumber: Berbagai Sumber

Bermain dengan Gajah di Ekowisata

Tangkahan



Foto: SumatraEcoTravel

Kolonel Mar Kusyuwono, S.H.

“Kita Harus Bisa Memimpin Diri Sendiri”

Menjadi Peserta PPRA 67 menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi Kolonel Mar Kusyuwono karena dirinya banyak mendapatkan ilmu yang sangat berguna. “Alhamdulillah bisa ikut pendidikan PPRA 67 tahun 2024 ini. (mendapatkan) khasanah ilmu yang sangat bermanfaat sekali terutama dari gatra sebagai unsur ketahanan nasional yaitu Ipoleksosbudhankam”, tuturnya di awal wawancara.

Menurutnya, menempuh pendidikan di Lemhannas RI juga membuatnya dapat berpikir lebih komprehensif, holistik dan integral jika nantinya diberikan amanah untuk menjadi pemimpin nasional. “Artinya bisa mengaitkan permasalahan dengan lingkungan strategis baik nasional, regional, maupun global sehingga dapat membuat keputusan yang bijaksana dan utuh,” jelas ayah dari dua anak.

Selain itu, Peserta pendidikan Reguler yang berasal dari berbagai latar belakang seperti TNI, POLRI, dan Sipil juga memberikan kesan yang tidak biasa bagi suami dari Yala Dewi Cahyantari, SP. Perwira Angkatan Laut yang pernah 26 tahun berdinastis di Surabaya ini mengaku bisa lebih mengerti cara berpikir dari sudut pandang sipil yang berbeda dengan militer.

Kolonel Mar Kusyuwono juga berkesempatan menjadi moderator saat Menko PMK memberikan ceramah bagi para peserta PPRA 67. Pria yang menjabat menjadi Kepala Bagian Penerangan Lemhannas RI sebelum menempuh pendidikan PPRA ini mendapatkan

pengetahuan lebih mendalam terkait sumber daya manusia dan kebudayaan.

Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1995 ini menuturkan bahwa manusia adalah insan yang dinamis karena berkembang sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi informatika. Generasi terus berkembang dari baby boomers hingga generasi alpha. Hal tersebut harus menjadi fokus pemikiran untuk mencapai Indonesia emas 2045.

“Kita harus kita pikir keberlangsungannya, jangan mikir sekarang aja, nanti gimana generasi kita meneruskan perjuangan mengisi dan mewujudkan cerita-cerita kemerdekaan ini, bagaimana keberlanjutan Indonesia ini. Kayaknya itu salah satu pengalaman yang berharga menurut saya,” tuturnya sembari tersenyum.

Selain itu, Pria kelahiran Madiun ini juga menyebutkan bahwa seorang pemimpin harus dapat memimpin dirinya sendiri. “Yang paling susah itu memimpin diri sendiri, kita belajar memimpin diri sendiri, pasti kalau bisa memimpin diri sendiri bisa memimpin keluarga. Kalau bisa memimpin keluarga, pasti bisa memimpin satu orang kan, gitu aja. Betul kan?,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan pendidikan, Kolonel Mar Kusyuwono berharap agar narasumber setingkat menteri dapat hadir di setiap ceramah. Di akhir wawancara, dirinya berharap Lemhannas RI dapat terus melaksanakan tugas serta visi lembaga. “Yang harus adalah memahami, menjaga, mengamalkan, mensosialisasikan khususnya Empat Konsensus Dasar Bangsa ini. Dari Pancasila, Undang-Undang 1945, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya.

Marsma TNI Ian Fuady

Harap Lemhannas RI Terus Didik Pemimpin Bangsa yang Modern, Inovatif, dan Adaptif

Program Pendidikan Reguler Angkatan 66 Lemhannas RI yang dimulai sejak Januari 2024 lalu telah ditutup pada 27 Agustus 2024. Peserta Pendidikan telah berhasil menjalani seluruh kegiatan pendidikan dengan baik. Peserta PPRA 66 yang berasal dari TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Ian Fuady menuturkan manfaat yang dirinya rasakan selama menjadi peserta.

Jenderal bintang satu lulusan AAU 1993 ini menuturkan bahwa dirinya mendapatkan wawasan yang lebih mendalam terkait Empat Konsensus Dasar Bangsa. "Pelajarannya yang menambah wawasan terhadap Empat Konsensus Dasar Indonesia dan juga menambah wawasan lain dimana selama ini saya hanya mendapatkan pelajaran bagaimana memenangkan perang dari sisi TNI saja. Di Lemhannas ini saya mendapat ilmu kenegaraan dan memecahkan persoalan dari berbagai sisi dengan diskusi dan studi kasus yang diberikan oleh lembaga," tuturnya.

Marsma TNI Ian Fuady mengatakan selama mengikuti PPRA 66 di Lemhannas RI, dirinya merasa senang karena dapat bertemu dengan teman-teman baru dari TNI, Polri, ASN, dan non-ASN. Menurutnya, peserta PPRA 66 memiliki hubungan yang dekat satu sama lain. "Teman-teman PPRA 66 semua nya mengasyikkan sehingga pendidikan selama tujuh bulan ini hampir tidak terasa," imbuh ayah dari M. Rizky Ramadhani dan Almira Danella Azzahra.

Menduduki jabatan Asisten Operasi Kas Koopsudnas sebelum mengikuti pendidikan di Lemhannas RI, Marsma

TNI Ian Fuady menyebutkan dirinya juga mendapatkan ilmu kenegaraan dan pemecahan persoalan dari berbagai sisi dengan diskusi dan studi kasus yang diberikan oleh Lemhannas RI.

Suami dari Dian Kartika Boediati, S.Pd ini berharap Lemhannas RI kedepannya dapat terus mendidik pemimpin bangsa yang modern, inovatif, dan adaptif. "Sangat diharapkan Lemhannas RI terus mendidik pemimpin bangsa yang modern, inovatif, adaptif terhadap perkembangan jaman yang tentunya pemimpin yang tidak lupa akan tujuan NKRI dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dan memajukan bangsa Indonesia," pungkasnya.

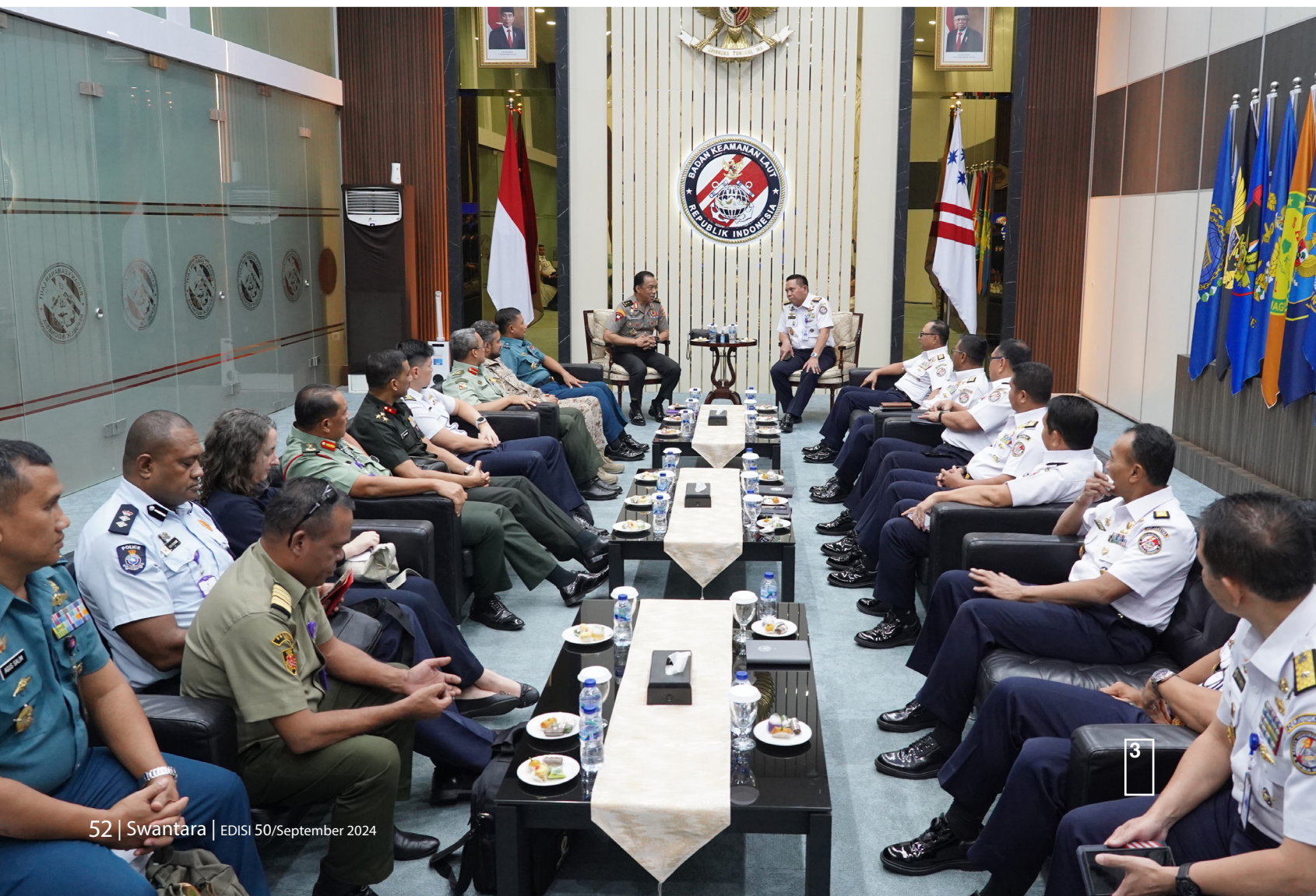




1 Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono menerima audiensi dari The Regional Delegation of the International Committee of the Red Cross (ICRC) untuk Indonesia dan Timor-Leste pada Kamis (4/7)

2 Dalam rangka mengumpulkan data kajian jangka panjang tentang "Pemetaan Potensi Laut Indonesia sebagai Penyerap Karbon untuk Pencapaian Target Net Zero Emission (NZE)", Tim Deputy Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI bertolak ke Lokus Provinsi Sulawesi Utara pada Minggu (28/7)

3 Para peserta mancanegara PPRA 66 Lemhannas RI melakukan Peninjauan Objek Penting (POP) pada Senin, (1/7)





4 Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas) PPRA 66 Lemhannas RI pada Selasa (6/8)



5 Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" di Lapangan Tengah Lemhannas RI, pada Sabtu (17/8)



6 Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI menyelenggarakan Upacara Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Angkatan II di Ruang Pancasila, Lemhannas RI, pada Senin (26/8)

6

7 Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi para anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pada Senin (9/9)

8 Ceramah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara kepada para peserta PPRa 67 Lemhannas RI pada Kamis (5/9)

9 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI pada Senin (2/9)





NUSANTARA BARU
INDONESIA MAJU

DIRGAHAYU Republik Indonesia

17 Agustus 2024





MEMPERINGATI

Maulid Nabi Muhammad SAW

12 RABIUL AWAL 1446 H

